



BNN KOTA
JAKARTA UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS

- KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
LAMPIRAN	4
DAFTAR TABEL	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Gambaran Umum	10
1.2 Dasar Hukum	12
1.3 Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Kewenangan	13
1.4 Struktur Organisasi	14
1.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategi BNN.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Ringkasan Kinerja	28
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	31
3.2 Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	54

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja 2023**
- 2. Hasil Perhitungan Indeks DEKTARA**
- 3. Hasil Perhitungan Indeks DEKTARI**
- 4. E-Mindik Laporan Kasus Narkotika**
- 5. Keputusan Kepala BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan**
- 6. Keputusan Kepala BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional Di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023**
- 7. Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan Rehabilitasi Narkotika Tahun 2023**
- 8. Indeks Kapabilitas Rehabilitasi 2023**
- 9. Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup T.A 2023**
- 10. Aplikasi Pelaporan Realisasi Hasil Pemantauan - eMonev PP39 Bappenas**
- 11. Laporan Ketersediaan Dan Per-Desember 2023**

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Struktur Organisasi BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2022
Tabel	2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	3.2	Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
	3.3	Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
	3.4	Capaian IKK Jumlah Institusi/Lingkungan Yang Turut Berpartisipasi Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba
	3.5	Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan
	3.6	Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta
	3.7	Capaian IKK Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup
	3.8	Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih
	3.9	Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional
	3.10	Daftar Lembaga Yang Operasional
	3.11	Capaian IKK Jumlah Klien Yang Mendapatkan Paket Layanan Rehabilitasi Pada Instansi Pemerintah
		Capaian IKK Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi
	3.12	Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional
	3.13	Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional
	3.14	Capaian IKR Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta
	3.15	Capaian IKM Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta
	3.16	Capaian IKK Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P-21
	3.17	Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara
	3.18	Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
	3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 65 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang dimaksud, Badan Narkotika Nasional melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Indikator Kinerja 1 : Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba merupakan indeks pengukuran “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Indikator Kinerja ini memiliki target 53,00 dan terealisasi 53,11 atau sebesar 100,21%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Indikator Kinerja 2 : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Indikator Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan program ketahanan keluarga. Indikator Kinerja ini memiliki target 78.69 dan terealisasi 78.036 atau sebesar 99.17%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kemandirian Partisipasi Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi diukur dari akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Pegiat Anti Narkoba. Target indikator kinerja ini adalah 3,25 dan terealisasi 3.65 atau 112.31%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

Indikator Kinerja 4 : Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur melalui penilaian menggunakan instrumen WHO-QoL. Dalam Layanan Rehabilitasi setiap Klien mengisi Formulir WHO-QoL sebanyak 2x yang dilakukan di awal dan di akhir Layanan. Target indikator kinerja ini adalah 80 dan terealisasi 98.33 atau 122.91%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Indikator Kinerja 5 : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Petugas IBM adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang terpilih dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan sebagai mitra BNN. Target indikator kinerja ini adalah 5 dan terealisasi 10 atau 200%

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

Indikator Kinerja 6 : Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Jumlah fasilitas Rehabilitasi yang operasional adalah lembaga instansi medis yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Target yang ingin dicapai adalah 3 dan hasil yang diperoleh adalah 5 atau sebesar 166.66%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Indikator Kinerja 7 : Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Target Indikator Kinerja ini adalah 2 Unit terealisasi 2 Unit atau sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika Di Klinik Rehabilitasi

Indikator Kinerja 8 : Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Jakarta Utara terhadap Klien Rehabilitasi. Target Indikator Kinerja ini 3,2 dan terealisasi 3,62 atau 113.12%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

Indikator Kinerja 9 : Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor yang P-21 Pengungkapan tindak pidana narkotika yang terungkap diukur menggunakan jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN). Target yang ingin dicapai adalah 1 Berkas, dan hasil yang diperoleh adalah 2 Berkas atau 200%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja 10 : Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja diukur melalui aspek implementasi dengan indikator pengukuran meliputi Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, CRO, Efisiensi dan Nilai Efisiensi. Target yang ingin dicapai adalah 87, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 85,54 atau 94%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Indikator Kinerja 11 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Target yang ingin dicapai adalah 92, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 95,91 atau 104,25%.

Pagu anggaran untuk mendukung Program di atas sebesar Rp. 2,208,810,000,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 2,191,418,262,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan prosentase realisasi anggaran 99,21%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dapat terselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNN Kota Jakarta Utara tahun 2023 dimaksudkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menetapkan, bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

BNN Kota Jakarta Utara pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional, BNN Kota Jakarta Utara melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Secara umum, Sasaran Strategis BNN Kota Jakarta Utara yang telah ditetapkan telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas melalui Program Dukungan Manajemen dan P4GN tentunya BNN Kota Jakarta Utara menemui beberapa hambatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

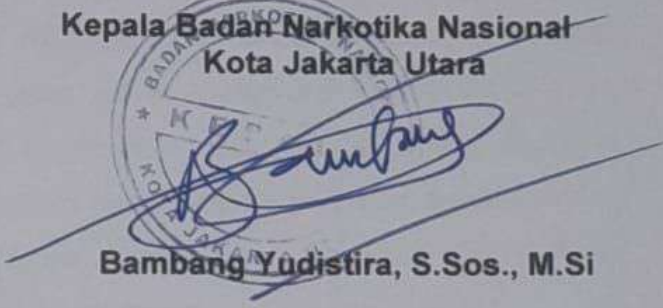
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja BNN Kota Jakarta Utara ini juga akan menjadi media pertanggungjawaban dan media Evaluasi Kinerja satker secara keseluruhan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja BNN Kota Jakarta Utara pada tahun 2023 dan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa yang akan datang.

BNN Kota Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua. Aamiin.

Jakarta, 26 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jakarta Utara



Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sector penanganan permasalahan narkotika. Adapun tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara (BNNK JAKUT) menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN Kota Jakarta Utara kepada masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN bertugas melakukan P4GN melalui berbagai kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerja sama secara terpadu dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 khususnya terkait isu pembangunan pertahanan dan keamanan, dan sebagai perwujudan visi dan misi serta nawa cita Presiden RI.

Sebagai wujud dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Jakarta Utara dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama (kerjasama lintas agama), mahasiswa, pelajar, maupun pekerja, pegawai negeri, TNI dan Polri untuk bersinergi menggalang kekuatan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahguna narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara.

Penyebaran narkoba di Kota Jakarta Utara semakin luas di berbagai kalangan. BNN Kota Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk menekan penyebaran narkoba wilayah Jakarta, terutama di wilayah yang diduga sebagai kantong-kantong peredaran narkoba di Jakarta Utara seperti Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok.

Banyak titik rawan masuknya narkoba secara gelap di Kota Jakarta Utara baik melalui darat maupun perairan/ pelabuhan laut yang menyebabkan banyaknya peredaran gelap narkoba sehingga meningkatkan jumlah penyalahguna dan atau pecandu narkoba di wilayah kota Jakarta Utara.

Diharapkan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika dapat mendorong para penyalahguna atau pecandu narkotika melaporkan diri untuk selanjutnya memperoleh perawatan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi permintaan atau melawan jaringan sindikat narkoba tanpa melalui penegakan hukum.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) perlu dilakukan secara komprehensif dengan tujuan :

- a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan menolak penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan.
- b. Peningkatan terciptanya lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan jumlah penyalahguna dan atau pecandu yang mendapat perawatan dan berkurangnya tingkat mantan penyalahguna dan atau pecandu yang kambuh kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.
- d. Peningkatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan penyitaan asset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika melalui kegiatan pemberantasan (penegakan hukum).

Dibidang Rehabilitasi, penanganan para pecandu narkoba telah dijabarkan dalam peraturan bersama 6 (enam) kementerian dan lembaga non kementerian yang meliputi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan BNN (Mahkumjakpol, BNN, Kemenkes dan Kemensos) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Lembaga Rehabilitasi, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang didahului dengan kegiatan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Psikolog serta Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, yang kemudian hasilnya dijadikan rekomendasi penanganan lebih lanjut kepada seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan sebagai penyalahguna narkoba.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2023 ini, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang kewajiban setiap satuan kerja yang menggunakan dana APBN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Jakarta Utara, seperti diatur dalam dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal P4GN ;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat serta memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam P4GN;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- g. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan

- h. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- c) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- d) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- e) pelaksanaan administrasi BNN Kota Jakarta Utara; dan
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Jakarta Utara

d. Kewenangan

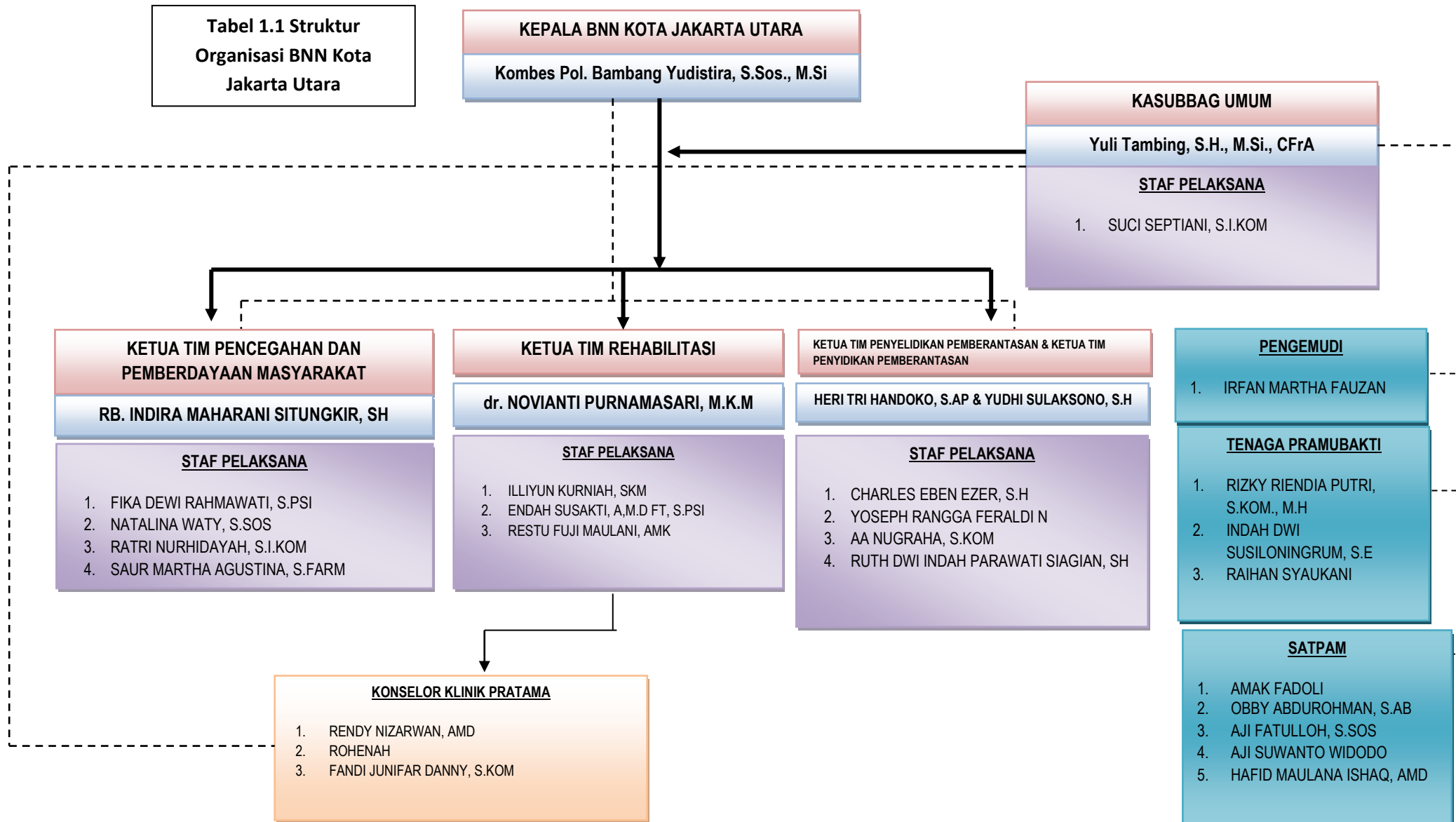
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.4 Struktur Organisasi

1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Kepala Sub Bagian Umum
- c. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Ketua Tim Rehabilitasi
- e. Ketua Tim Penyelidikan Pemberantasan dan Ketua Tim Penyidikan Pemberantasan
- f. Jabatan Fungsional

**Tabel 1.1 Struktur
Organisasi BNN Kota
Jakarta Utara**



1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi BNN Kota Jakarta Utara serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini berisi tentang perencanaan strategis BNN Kota Jakarta Utara yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi serta perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja BNN Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yang meliputi membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BNN

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional RI (Renstra BNN tahun 2020-2024) dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara sebagai instansi vertikal BNN di Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksana kebijakan dan operasional program dan kegiatan P4GN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN.

Sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara akan menindaklanjuti Rencana Strategis (Renstra) BNN ke dalam program dan kegiatan. Dalam mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah yang berada di wilayah dan sebagai cita-cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, maka perlu menindaklanjuti Visi dan Misi BNN dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Presiden RI terpilih Periode 2020-2024 sebagai berikut:



VISI

VISI Presiden Jokowi-Mahruf Amin Dalam Nawa Cita, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

VISI BNN adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Presiden Jokowi-Mahruf Amin juga telah menetapkan MISI yang juga menjadi bagian MISI Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, yaitu:

MISI

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan mandiri bagi masyarakat Kota Jakarta Utara.
2. Percepatan Indonesia Bebas Narkoba

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:





Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan VISI dan MISI tersebut di atas, serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menetapkan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN	- Melakukan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara <i>demand reduction</i> dan <i>supply reduction</i>. - Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan. - Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.
-----------------------	---

Strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kebijakan tersebut tahun 2023 adalah sebagai berikut:

STRATEGI	Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia
-----------------	---

	dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas; b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri; c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L; d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba dengan menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba; e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan BNN Kota Jakarta Utara.
--	--

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Jakarta Utara, maka sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud serta berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh BNN yang menetapkan adanya 2 (dua) program yaitu Program Teknis dan Program Generik, maka perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2023 telah dituangkan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Untuk melaksanakan ke 2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*)

Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Advokasi :

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 10 Keluarga & 2 Volume Desa. Kegiatan tersebut direalisasikan melalui kegiatan:

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
- Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

2) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan volume 2 lembaga yaitu lembaga Pendidikan dan lembaga swasta. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Di lingkungan Instansi Pemerintah :

- Rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

- Rapat kerja program pemberdayaan Masyarakat anti narkoba
- Rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota tanggap ancaman narkoba.
- Konsolidasi kebijakan kota tanggap narkoba pada sektor kelembagaan

b. Di lingkungan Pendidikan

- Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan
- Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
- Pemberdayaan anti narkoba melalui tes urine
- Workshop tematik P4GN

c. Di lingkungan Swasta

- Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan swasta
- Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan swasta

3) Pengelolaan informasi dan edukasi P4GN memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan volume 10 Orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Dialog Interaktif Remaja.
- Informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi P2M BNN Kota Jakarta Utara Rp 317.645.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Standarisasi Profesi dan SDM memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi dengan target 5 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Bimbingan teknis Petugas IBM
 - Monitoring Rencana Aksi
- 2) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat memiliki sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 4 lembaga, 100 Klien Rawat Jalan, 18 Klien IBM dan 150 Orang Target SKHPN (PNBP) direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
- Fasilitasi dan pembinaan Lembaga, melalui kegiatan :
 - Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota
 - Layanan Rawat Jalan.
 - Layanan IBM
 - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
 - Pendampingan pemulihan
 - Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)
 - Monitoring dan evaluasi
 - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, melalui kegiatan :
 - Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi
 - Rapat Koordinasi Tingkat Kota
 - Monitoring fasilitas rehabilitasi
 - Pembentukan unit IBM
 - Supervisi dan Asistensi

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bidang Rehabilitasi sebanyak
Rp 233.760.000,-

3. Seksi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Utara

a. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika.

- 1) Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 3 kali penyelidikan.
- 2) Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 kali penyidikan.
- 3) Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 berkas.

b. Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika

- 1) Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika sebanyak 30 orang.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi Pemberantasan sebanyak
Rp 138.650.000,-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional/ Program Generik tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu :

- Layanan Perkantoran dengan volume 12 layanan direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- Layanan Manajemen Keuangan dengan volume 1 dokumen direalisasikan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan

b) Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen kegiatan yaitu Layanan Manajemen SDM dengan volume 1 Layanan. Kegiatan ini direalisasikan dalam rangka :

- Pengembangan Kapasitas Pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai berupa Outbond dilaksanakan 1 kali kegiatan.
- Pelayanan Kesehatan Pegawai meliputi pembinaan jasmani yang terbagi menjadi kegiatan senam sebanyak 1 kali, sewa fasilitas olahraga sebanyak 3 kali dan pelayanan kesehatan pegawai selama 6 Bulan.

c) Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Terdiri dari 2 sub komponen kegiatan yaitu:

- Layanan perencanaan dan penganggaran dengan target output 1 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara, kegiatan koordinasi & sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, serta koordinasi penyelarasan anggaran.
- Layanan pemantauan dan evaluasi dengan target 1 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan kinerja & anggaran dan kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan RAN P4GN Wilayah.

- d) Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana
Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen besar yaitu sebagai berikut .
- i. Layanan Dukungan Manajemen Internal yang mana terdiri dari 3 sub komponen yaitu
- Layanan Perkantoran, target output 12 Layanan yang direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan gedung & penataan ruang kantor, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa lainnya, tenaga kerja kontrak, keperluan sehari-hari perkantoran, honor pengolah BMN, rekonsiliasi lapor BMN ke KPKNL dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa.
 - Layanan Umum, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan rapat kerja teknis, koordinasi kelembagaan, pelatihan menembak dan rapat koordinasi kelembagaan
 - Layanan BMN, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan penghapusan BMN dan Rapat koordinasi pengelolaan BMN
- ii. Layanan Sarana Internal dengan volume 34 unit yang dalam kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 sub komponen yaitu
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang direalisasikan dalam bentuk pembelian Laptop, Saramonic & Printer
 - Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran yang direalisasikan dalam bentuk pembelian Kursi ruang rapat, Filling Cabinet, Mesin Penghancur Kertas, Lemari Loker Besi, Lemari Kabinet Susun, Laci Besi & Kursi Roda
- e). Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan ini memiliki volume 1 Dokumen. Adapun layanan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Arsip.
- f). Penyelenggaraan dan Kehumasan dan Keprotokolan
- layanan hubungan masyarakat dan informasi ini memiliki volume 1 layanan. Adapun layanan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan press release, kegiatan kehumasan, publikasi kelembagaan, penyelenggaran

pameran, pengadaan bahan informasi kelembagaan dan peliputan giat kehuamasan di dalam kota.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bagian Umum BNN Kota Jakarta Utara sebanyak **Rp 1,448,755,000,-**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara yang ditandatangani pada bulan Februari tahun 2023, bahwa Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Unit Organisasi Eselon III : BNN Kota Jakarta Utara
Tahun Anggaran : 2023

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1 Berkas
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	91 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	92 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA JAKARTA UTARA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Ringkasan Kinerja

BNN Kota Jakarta Utara menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator. Adapun realisasi pencapaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	R e a l i s a s i	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00 Indeks	53.11 Indeks	100.21%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks	78.036 Indeks	99.17%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25 Indeks	3.65 Indeks	112.31%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami	80 Indeks	98.11 Indeks	122.63%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	R e a l i s a s i	Capaian
1	2	3	4	5	
		peningkatan kualitas hidup			
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	10 Orang	200.00%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	5 Lembaga	166.66%
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	3.62 Indeks	113.12%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas	200%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks	85,54 Indeks	94.00%
11	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	92 Indeks	95,91 Indeks	104.25%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	R e a l i s a s i	Capaian
1	2	3	4	5	
	keuangan yang sesuai prosedur				

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	217.645.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	13.210.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	186.110.000
6. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	15.880.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	50.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	50.000.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	97.430.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	20.000.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	13.920.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.277.405.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2023, BNN Kota Jakarta Utara melakukan pengukuran capaian kinerja melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara deskriptif atau dalam bentuk narasi. Evaluasi capaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

1.

SASARAN : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Sasaran kinerja meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.2
Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	53,11	100,21%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah melalui Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Alat untuk mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan BNN melalui metode ADS (*Anti Drugs Scale*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Metode ini menggunakan

Model *Full Form* adalah yang digunakan dengan kuesioner sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pertanyaan ADS dan 28 (dua puluh delapan) pertanyaan *predictor*.

Faktor pendukung dalam menyelenggarakan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Tingkat kepedulian peserta yang tinggi sangat membantu terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu.

Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dicapai BNN Kota Jakarta Utara di Tahun 2023 berada di angka 53,11 dimana target nasional yang tertuang dalam RENSTRA BNN 2020 -2024 berada di angka 53,00 yang berarti dalam hal ini BNN Kota Jakarta Utara berhasil melampaui target sebesar 100.2 %. BNN Kota Jakarta Utara juga menjadi salah satu satker yang capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berada dalam kategori tinggi.

Adapun Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Tahun 2023 dapat dilampaui targetnya oleh BNN Kota Jakarta Utara :

- Meningkatnya kesadaran akan bahaya laten narkoba dari lingkungan pendidikan dengan banyaknya permohonan sosialisasi dari beberapa sekolah di wilayah Jakarta Utara.
- Pemutaran lagu Mars BNN di lingkungan sekolah seleum upacara/sebelum mulai kegiatan pembelajaran
- Jumlah pelajar di wilayah Jakarta Utara yang terpapar informasi bahaya narkoba sejumlah 14. 940 pelajar di wilayah Jakarta Utara.

2.

SASARAN : Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2023 ini, BNN Kota Jakarta Utara ditantang untuk mampu memenuhi target indeks ketahanan keluarga 78,67%.

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Tabel 3.3
Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	78.036	99,17 %

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tentang Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan Program Ketahanan Keluarga. Berdasarkan penilaian didapatkan nilai IKK Jakarta Utara sebesar 78.036 dengan kategori tinggi. Nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam TAPKIN BNN Kota Jakarta Utara tahun 2023 yaitu sebesar 78,69. Adapun intervensi yang dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga adalah dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di Kelurahan Sunter Jaya. Dimana dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber (praktisi) yang mumpuni dibidangnya yakni Psikolog Keluarga sehingga materi yang sampaikan dapat diaplikasikan langsung oleh audiens yang terdiri dari 5 (lima) keluarga (5 Ibu dan 5 anak). Hal tersebut yang dinilai meningkatkan kualitas pelatihan sehingga materi dapat tersampaikan.

Indikator kinerja tersebut di atas merupakan upaya melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara dalam meningkatkan keterlibatan keluarga adalah:

1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba.
2. Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba anti narkoba.
3. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

Metode pengukuran yang digunakan adalah melalui kuesioner kepada 5 (lima) keluarga yang terdiri dari 5 (lima) Ibu dan 5 (lima) Anak , dengan kuesioner yang diberikan dan dinilai oleh Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN.

3.

SASARAN : Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan Narkoba

Sasaran Strategis tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu jumlah instansi/lingkungan yang menjadi output dalam Program kebijakan kota tanggap ancaman narkoba sebanyak 2 instansi/lembaga, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan swasta. Namun institusi yang turut serta/berpartisipasi dalam kebijakan kota tanggap ancaman narkoba adalah Institusi/lembaga pemerintah, instansi swasta, Masyarakat, dan lingkungan pendidikan yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba atau pembinaan penggiat anti narkoba, kemitraan, dan pelaksanaan tes urine.

Dari output 2 (dua) lembaga di tahun 2023, yaitu di lingkungan swasta dan pendidikan menghasilkan beberapa kegiatan/inovasi antara lain:

a. Lingkungan Pendidikan

Pelaksanaan Ikrar/ Deklarasi Anti Narkoba di Sekolah setiap Upacara Senin yang diikuti seluruh pelajar serta Posko P4GN di sekolah sebanyak 16 (enambelas) sekolah di wilayah Jakarta Utara

b. Lingkungan Swasta

Pelaksanaan Himbauan P4GN dan Regulasi terkait Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerja masing masing.

Tabel 3.4
Capaian IKK Jumlah Institusi/Lingkungan Yang Turut
Berpartisipasi Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Institusi/Lingkungan Yang Turut Berpartisipasi Dalam Program kebijakan kota tanggap ancaman narkoba	2 Institusi/ Lembaga	2 Institusi/ Lembaga	100 %

Hasil capaian diukur melalui monitoring dan evaluasi dengan kriteria penilaian instansi/lingkungan yang secara mandiri berpartisipasi menyelenggarakan program P4GN. Dari kelompok sasaran yang berpartisipasi melaksanakan program pemberdayaan antara lain dunia usaha/swasta sebanyak 1 kali kegiatan, 20 (dua puluh) perusahaan. Dan lingkungan pendidikan sebanyak 1 kali kegiatan, 20 (dua puluh sekolah)

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan P4GN yaitu:

- a. Pengukuran indikator-indikator tentang kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- b. Melaksanakan wawancara langsung kepada instansi swasta, dan lingkungan pendidikan yang menunjukkan kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- c. Pengisian kuesioner untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran telah menunjukkan adanya kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Dari hasil metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendidikan

Dari hasil pengolahan data IKM pada lingkungan pendidikan yang terdiri dari 20 (dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 5 (Lima) orang penggiat anti narkoba mandiri dalam mengimplementasikan P4GN, 15 (lima belas) orang penggiat dengan kategori sangat mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada Lingkungan Pendidikan adalah 3.73 atau sangat mandiri.

Tabel 3.5 Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan

INSTANSI	MANUSIA 20%		METODE 10%		ANGGARAN 20%	SISTEM 20%					SARPRAS 10%				KEGIATAN 20%											TOTAL	IKP						
	1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)	7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)								
B PENDIDIKAN																																	
1 Suparti - SDN Papanggo 01	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
2 Supriadi - SDN Papanggo 03	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
3 Saidah Rusli - SMPN 65	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	0	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI				
4 Hj. Sepu Latif Ibrahim, M.Si - SMPN 129	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI				
5 Nadia Khairunissa - SMK Pelayaran Jakarta	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
6 N. Sri Rohmuni - SMP PADINDI	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
7 Jamaluddin Hasan - Ben Tree School	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
8 Ruliyah - SDN Kalibaru 01	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI				
9 Sri Suharyani - SDN Kalibaru 03	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
10 Agus Setiawan - SMP 53	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	95	3.8	B	MANDIRI				
11 Susanti - SMA 73	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
12 Suhada Wijaya - SMK Miftahiyah	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
13 Ridwan Hakim - SMP Cendikia Kalibaru	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI				
14 M. Irwan - SMPN 30	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
15 Juni Wibowo - SDN Sunter Agung 07	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
16 Diah Natasa - SMA 52	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
17 Irawan Suharja - SMAN 72	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
18 Inri Bernita Sianturi - SMAN 40	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	77	3.08	B	MANDIRI				
19 Ribka Litantara - SPK SMAK Penabur	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
20 Kurniasari Ariningsih - SMAN 45	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI				
																										1866	3.732	A	SANGAT MANDIRI				

2. Lingkungan Swasta

Dari hasil pengolahan data IKP pada lingkungan swasta yang terdiri dari 20 (dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 17 (tujuh belas) orang penggiat dengan kategori sangat mandiri. 3 (tiga) orang penggiat anti narkoba dengan hasil mandiri. diperoleh hasil Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada lingkungan swasta adalah 3.578 atau sangat mandiri.

**Tabel 3.6 Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba
di Lingkungan Swasta**

INSTANSI	PENILAIAN IKP																									TOTAL	IKP		
	BOBOT																												
	MANUSIA 20%		METODE 10%		ANGGARAN 20%		SISTEM 20%					SARPRAS 10%				KEGIATAN 20%													
	1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)	7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)				
A INSTANSI SWASTA																													
1 I Made Karisma Wiguna - PLN Icon	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	89	3.56	A	SANGAT MANDIRI
2 Joko A. Widhi - PT EDII	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	0	92	3.68	A	SANGAT MANDIRI
3 Dervan - Red Wolf	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	SANGAT MANDIRI
4 Iman Saputra - NIX Kitchen	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	0	92	3.68	A	SANGAT MANDIRI
5 Iko Nurjaman - PT El Shaddai El	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI
6 Ali Rosyadi - PT Samudera Properti Ind	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	0	1	1	1	0	3	0	2	2	2	1	89	3.56	A	SANGAT MANDIRI
7 M. Angga Permana - HW Dragon	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	0	0	2	2	2	2	1	90	3.6	A	SANGAT MANDIRI
8 Robby Zaenur Rahman - PT JNE	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	0	2	2	2	0	90	3.6	A	SANGAT MANDIRI
9 Soleh - Camden Sunter	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	0	0	2	2	1	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
10 Aan Abdul Rahman - PT Sinar Mulia	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	0	0	0	89	3.56	A	SANGAT MANDIRI
11 Hendrawan Mukti-Champion Karaoke	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
12 Alesia F-Qoin Café	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	89	3.56	A	SANGAT MANDIRI
13 Muchlis Nugraha - Astra Isuzu	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	0	1	91	3.64	A	SANGAT MANDIRI
14 Nurwati Sri - Viar Indonesia	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	SANGAT MANDIRI
15 Ramdan S - Hermosa PIK	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
16 Mahartyas -SiCepat Express	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI
17 Aryo Puji - PT Haier	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
18 Syamsudin Yusuf - PT Adi Sarana Armada	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
19 David R - PT Anita Prima Indonesia	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	MANDIRI
20 Yeni Nur Syifa - PT Harapan Widyatama	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	0	91	3.64	A	SANGAT MANDIRI
																										1789	3.578	A	SANGAT MANDIRI

Secara keseluruhan nilai Indeks Kemandirian Partisipasi di Jakarta Utara sebesar 3,65 nilai ini diperoleh dari rata-rata IKP di 2 lingkungan baik Lingkungan Pendidikan dan Swasta Sementara itu nilai lebih besar jika dibandingkan dengan target Rencana Strategi Nasional (Renstra) yaitu sebesar 3,25. Dengan demikian bisa dilihat bahwa nilai kemandirian partisipasi masyarakat di Jakarta Utara melebihi target yang ditentukan. Adapun faktor yang mendukung kemandirian masyarakat di Jakarta Utara yaitu:

- Adanya dukungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Instuksi Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang P4GN di Jakarta Utara dan rencana alokasi anggaran P4GN yang disisipkan di 31 Kelurahan di Jakarta Utara untuk anggaran 2023.

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten narkoba, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah orang yang terpapar informasi P4GN melalui sosialisasi.
- Meningkatnya perjanjian dan kerjasama dengan lingkungan swasta terkait kegiatan P4GN baik melalui tes urine dan sosialisasi secara mandiri
- Penyebaran informasi bahaya narkoba yang dilakukan di lingkungan pendidikan semakin kreatif dan beragam baik melalui himbauan spanduk, medsos, lomba poster, dll.

4.

SASARAN : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

Dalam sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator yaitu Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 80 indeks.

Tabel 3.7
Capaian IKK Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	80 Indeks	98.33 Indeks	122.91%

Pengukuran Peningkatan Kualitas Hidup pada penyalahguna dan/atau pecandu yaitu melalui penilaian menggunakan instrumen WHO-QoL. Dalam Layanan Rehabilitasi setiap Klien mengisi Formulir WHO-QoL sebanyak 2x yang dilakukan di awal dan di akhir Layanan. Hasil peningkatan WHO-QoL menunjukkan adanya perubahan Kualitas Hidup Klien setelah menjalani Layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara. Dan didapatkan Nilai Peningkatan Persentasi Kualitas Hidup Klien sebesar 98,33 % klien mengalami peningkatan Kualitas Hidup. Aspek dilihat dari seluruh kualitas hidup dan kesehatan secara umum terdiri dari aspek Kesehatan fisik, psikologi, sosial dan lingkungan.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Petugas rehabilitasi melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi pada klien secara optimal.
2. Adanya kesadaran diri klien untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Adanya dukungan keluarga yang dapat mempengaruhi pemulihan klien.

5. SASARAN : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Dalam sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator yaitu Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 5 orang.

Tabel 3.8
Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	5 Orang	10 Orang	200%

Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) atau kita kenal dengan sebutan Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan sebagai mitra BNN. Dalam indikator kinerja kegiatan ini dengan capaian realisasi 10 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Faktor yang mendukung indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Adanya kepedulian petugas penyelenggara di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kelurahan yang bersih dari narkoba dan membantu warganya yang membutuhkan layanan rehabilitasi narkoba.
2. keaktifan dari para petugas penyelenggara layanan IBM dalam menjalankan program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat).

6. SASARAN : Terselenggaranya Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional terdiri dari Instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat dengan target sebanyak 3 fasilitas, Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi yang operasional dengan target 3 Lembaga dan Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi

Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi yang operasional dengan target 100%.

Tabel 3.9
Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional	3 Fasilitas	5 Fasilitas	166.66 %

Fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, Puskesmas, Yayasan dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Berikut daftar fasilitas rehabilitasi pada yang operasional di wilayah Jakarta Utara :

Tabel 3.10
Daftar Lembaga Yang Operasional

No	Nama Fasilitas	Jenis Layanan Rehabilitasi
1.	RSPI Sulianti Saroso	Rawat Jalan
2.	Puskesmas Kelapa Gading	Rawat Jalan
3.	Puskesmas Ancol	Rawat Jalan
4.	Klinik Sisma Medika Warakas	Rawat Jalan
5.	Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (New Hope)	Rawat Inap
6	Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara	Rawat Jalan

Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi bagi petugas layanan rehabilitasi Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat baik Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara, RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Ancol, Puskesmas Kelapa Gading, Klinik Sisma Medika Warakas, dan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (New Hope).
2. Adanya perjanjian kerja sama dengan RSPI Sulianti Saroso yang menjalankan layanan rehabilitasi.
3. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kelapa Gading yang menjalankan layanan rehabilitasi. Dan pada tahun ini hasil evaluasi SNI dinyatakan bahwa Puskesmas Kelapa Gading telah memenuhi syarat SNI (Standar Nasional Indonesia).
4. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Ancol yang menjalankan layanan rehabilitasi.

5. Adanya perjanjian kerja sama dengan PMI Kota Jakarta Utara yang menjalankan layanan rehabilitasi.
6. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kelapa Gading yang menjalankan layanan rehabilitasi.
7. Adanya perjanjian kerja sama dengan Klinik Sisma Medika Warakas yang menjalankan layanan rehabilitasi.
8. Adanya perjanjian kerja sama dengan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (New Hope) yang menjalankan layanan rehabilitasi.
9. Terlaksananya bimbingan teknik kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun Komponen Masyarakat yaitu RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Kelurahan Ancol, Puskesmas Kelapa Gading, Klinik Sisma Medika Warakas dan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (New Hope) untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan sinergitas program layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Hambatan pada Tahun 2023:

1. Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Kelurahan Ancol, RSPI Sulianti Saroso, Klinik Sisma Medika Warakas dan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (New Hope) dalam melaksanakan layanan rehabilitasi masih kekurangan SDM (Sumber Daya Masyarakat).
2. Belum semua Petugas layanan rehabilitasi mendapatkan Pengembangan kapasitas/pelatihan terkait layanan rehabilitasi.

Tabel 3.11
Capaian IKK Jumlah Klien Yang Mendapatkan
Paket Layanan Rehabilitasi Pada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	100	125	125%

Tabel 3.12
Capaian IKK Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi
Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika
Pada Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional	100 %	100%	100%

Target persentase 100% tersebut diambil dari dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi pada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang merupakan klien yang memperoleh perawatan atau layanan rehabilitasi pada fasilitas dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kepatuhan klien dalam mengikuti program rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara baik. Terdapat 125 orang penyalahguna/ korban penyalahguna/ pecandu narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Utara
2. Target layanan SIL terpenuhi sebanyak 80 orang berkat dukungan dari stakeholder setempat yang bekerjasama seperti Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing serta informasi dari masyarakat setempat.

7. SASARAN : Terselenggaranya Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional dengan target 2 Unit.

Tabel 3.13
Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100 %

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar (Bersih Narkotika). Pada tahun ini Unit IBM (intervensi Berbasis Masyarakat) yang terbentuk realisasinya sebanyak 2 Unit sesuai target yaitu IBM kelurahan Papanggo dan IBM Kel Kalibaru.

Faktor Pendukung tercapainya sasaran kinerja kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya bimbingan teknik, verifikasi dan monitoring dan evaluasi kepada Unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) sehingga diharapkan program ini dapat memenuhi standar pelayanan minimum.
2. Adanya koordinasi yang baik, sinergitas program dengan stakeholder yang ada di wilayah serta petugas IBM yang aktif dalam memberikan layanan program rehabilitasi di wilayah masing-masing.
3. Adanya dukungan penuh dari stakeholder Kelurahan terhadap program IBM baik dalam pelaksanaan Rapat Tim maupun Rapat Koordinasi IBM

Faktor Penghambat :

1. Adanya rutinitas pekerjaan dari masing-masing tim agen pemulihan IBM maupun perangkat kelurahan, sehingga perlu penjadwalan kegiatan dengan baik.
2. Program IBM belum ada pendanaan mandiri yang rutin dari kelurahan maupun CSR.

8.

SASARAN : Tercapainya kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dengan target 3.2 Indeks.

Tabel. 3.14

Capaian IKR Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta

Provinsi	Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Aksesibilitas	Indeks Akseptabilitas	Indeks Kualitas	Indeks Kontinuitas	IKR
DKI JAKARTA	BNN Kota Jakarta Utara	3,60	4.00	4,00	3,20	4,00	3,62

Indeks Kapabilitas rehabilitasi (IKR) adalah pengukuran representatif untuk pemetaan atau potret atas kapabilitas/kemampuan Lembaga rehabilitasi.

Kapabilitas Rehabilitasi mencakup lima indikator yaitu:

1. Ketersediaan (*availability*)
2. Aksesibilitas (*accessibility*)
3. Penerimaan (*acceptability*)
4. Kualitas (*quality*)
5. Keberlanjutan (*continuity*)

yang kemudian indikator tersebut akan diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner (variabel pembentuk indeks). Nilai IKR Klinik Pratama Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara adalah 3,62 Indeks.

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi digunakan sebagai rekomendasi untuk optimalisasi kinerja ke depan agar lebih optimal dalam memberikan kualitas layanan rehabilitasi dan SDM di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara.

Tabel. 3.15

Capaian IKM Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.2 Indeks	3.89 Indeks	121.56 %

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Utara.

Terdapat 9 unsur/komponen pertanyaan yang didiskusikan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, pelaksana layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Faktor yang mendukung sasaran kinerja kegiatan ini adalah:

1. Adanya Petugas Rehabilitasi yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan pelatihan terkait layanan rehabilitasi narkoba.
2. Adanya persyaratan yang mudah untuk penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk mengikuti layanan rehabilitasi.
3. Adanya prosedur pelayanan sesuai standar kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Adanya sarana dan prasarana yang mendukung layanan rehabilitasi.

Indeks Kapabilitas rehabilitasi (IKR) adalah pengukuran representatif untuk pemetaan atau potret atas kapabilitas/kemampuan Lembaga rehabilitasi.

Kapabilitas Rehabilitasi mencakup lima indikator yaitu:

6. Ketersediaan (*availability*)
7. Aksesibilitas (*accessibility*)
8. Penerimaan (*acceptability*)
9. Kualitas (*quality*)
10. Keberlanjutan (*continuity*)

yang kemudian indikator tersebut akan diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner (variabel pembentuk indeks). Nilai IKR Klinik Pratama Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara adalah 3,89

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi digunakan sebagai rekomendasi untuk optimalisasi kinerja ke depan agar lebih optimal dalam memberikan kualitas layanan rehabilitasi dan SDM di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara.

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang bersifat kronik dan kambuhan. Oleh karena itu, dalam proses terapi dan rehabilitasi terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar pecandu dan penyalah guna narkoba pulih (McLellan, 2003). Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan Pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan penyalah guna narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pasca rehabilitasi.

Kegiatan Inovasi Kegiatan Seksi Rehabilitasi antara lain:

1. Kegiatan Sosialisasi Program IBM di Kelurahan di Wilayah Jakarta Utara.
2. Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Kumala sampai Tahun 2025 (layanan Pascarehabilitasi).
3. Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan PMI Kota Jakarta Utara sampai Tahun 2024
4. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr Sulianti Saroso (Layanan Rehabilitasi Rawat jalan, Laboratorium, Ambulance, Psikolog).
5. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kec. Kelapa Gading (Layanan Rehabilitasi Rawat jalan).
6. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kel. Ancol (Layanan rehabilitasi Rawat jalan).
7. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Pegadaian Syariah Kelapa Gading (Agen Pemulihan dan Klien menjadi Agen Pegadaian agar mereka lebih mandiri dan Produktif dalam peningkatan kualitas hidup)
8. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Klinik Sisma Medika Warakas (Layanan rehabilitasi Rawat jalan)
9. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia (Layanan rehabilitasi Rawat Inap).
10. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Universitas Persada Indonesia YAI (Yayasan Administrasi Indonesia) terkait psikologi klinis

11. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Koja Trade Mall (layanan mall Pelayanan Publik untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkoba dan layanan rehabilitasi narkoba).
12. Petugas Rehabilitasi dan Agen Pemulihan dapat mengikuti pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh PT. Indonesia Power tanggal 16 Maret 2023 di kantor PT PLN Indonesia Power Priok PGU. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para Agen IBM untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam hal menyampaikan informasi dan komunikasi.
13. Penyebaran Podcast Jakarta Utara Bersinar bersama PMI Jakarta Utara dalam rangka Pra-HANI 2023 dengan tema mantan penyalahguna apakah bisa donor darah? Tanggal 22 Juni 2023 untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar peduli lingkungan sekitar terkait bahaya narkoba dan stop stigma negative kepada korban atau mantan penyalahguna narkoba.
14. Mendapat kunjungan kerja dari Narcotics Control Bureau (NCB) tanggal 5 Oktober di kantor BNN Kota Jakarta Utara, ingin mengetahui layanan Rehabilitasi Narkoba di BNN Kota Jakarta Utara, berbagi pengalaman dan inovasi terkait layanan Rehabilitasi Narkoba.
15. Penandatanganan kerja sama Griya Abhipraya “Cira” Bapas Kelas I Jakarta Timur dan Utara dengan BNN Kota Jakarta Utara dan Instansi lainnya tanggal 22 November 2023 terkait bersinerginya dalam memberikan pelatihan kepada klien Pasca Rehabilitasi Narkoba.
16. IBM Pandawa (Kel Kalibaru) menjalani Kegiatan Program Mandiri dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Kelurahan serta Masyarakat dalam rangka Pembekalan dan Refleksi Perangkat RT dan RW di Hotel Cipayung Bogor pada tanggal 9 Desember 2023.
17. BNN Kota Jakarta Utara berpartisipasi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Kota layak anak tahun 2023. BNN Kota Jakarta Utara berperan aktif dalam penanganan klien anak yang menjalani rehabilitasi narkoba di Klinik Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara.

Faktor tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan pendampingan bagi petugas IBM untuk program rehabilitasi maupun pascarehabilitasi pada masyarakat dan lembaga rehabilitasi, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
2. Terdapatnya dukungan dari stakeholder atau Dinas Instansi Pemerintahan (Kelurahan setempat) di Wilayah Jakarta Utara, sehingga program agen pemulihan pascarehabilitasi dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya Program agen Pemulihan di wilayah (Pademangan Barat, Tanjung Priok, Ancol, Pademangan Timur, Sunter Jaya, Warakas, Papanggo dan Kalibaru) membuat warga lebih berani menjalankan rehabilitasi rawat jalan sampai dengan selesai, sehingga dapat dilanjutkan ke kegiatan pascarehabilitasi, dan dapat hidup produktif dimasyarakat sehingga kembali ke fungsi sosial.
4. Menjalin komunikasi dengan baik kepada seluruh stakeholder melalui sosial media sebagai contoh menggerakkan program seksi rehabilitasi BNNK Jakarta Utara termasuk program IBM dan melakukan motivasi kepada petugas.

Rencana Kerja Program Rehabilitasi Tahun 2024:

1. Melakukan Kerjasama dengan Puskesmas Cilincing.
2. Melakukan Perpanjangan Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik maupun Yayasan yang sudah menjalani Layanan Rehabilitasi.
3. Menambah kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik maupun Yayasan yang mau membuka layanan Rehabilitasi.

Faktor Hambatan dalam pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi diwilayah Jakarta Utara diantaranya :

1. Jumlah Kuota Peningkatan Kompetensi bagi pegawai rehabilitasi semakin sedikit
2. Minimnya anggaran operasional Intervensi Berbasis Masyarakat, yang salah satunya tidak ada alokasi dana transportasi bagi agen pemulihan. yang dimana rumah dari warga yang menjadi agen pemulihan tidak semuanya dekat dan cukup jauh dari kelurahan sehingga memerlukan biaya transportasi.

9.

SASARAN : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Pada tahun 2023 BNN Kota Jakarta Utara berkomitmen untuk terus melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Untuk tahun 2023, BNN Kota Jakarta Utara berhasil melakukan pengungkapan 2 kasus narkoba dengan tersangka 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita yang ditangkap di wilayah Jakarta Utara.

Tabel 3.16
Capaian IKK Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba Yang P-21

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1 Berkas	2 Berkas (2 LKN)	200 %

Pengungkapan kasus narkoba dengan dukungan anggaran DIPA sebanyak 2 (dua) berkas yaitu :

- a. Tersangka a.n. ARDANI YUSUF bin SUHERMAN (Alm.) alias UCUP dengan BB Narkoba sebanyak 7,21 gram brutto sabu.
- b. Tersangka a.n. FERANIKA SUSANTI binti TEDDY GUNAWAN dengan BB Narkoba sebanyak 86,39 gram brutto sabu.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya adalah tidak terdapatnya alat IT yang digunakan untuk *tapping/sadap* yang dimiliki oleh BNN Kota Jakarta Utara sehingga petugas tidak dapat secara langsung mengetahui keberadaan target ketika sudah mendapatkan nomor *handphone* target. Pada beberapa target pelaku selalu merubah nomor *handphone* dan berkomunikasi menggunakan media sosial (*FB, twitter, whatsapp*) sehingga analis maupun alat IT tidak mampu menjangkaunya. Selain itu terbatasnya jumlah SDM yang menguasai di bidang IT untuk mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. Hal ini menjadi salah satu yang mempengaruhi kurang maksimalnya dalam pengembangan kasus-kasus narkoba yang ditangani oleh BNN Kota Jakarta Utara untuk mendapatkan pelaku jaringan peredaran gelap narkoba yang lebih besar lagi.

10.

SASARAN : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

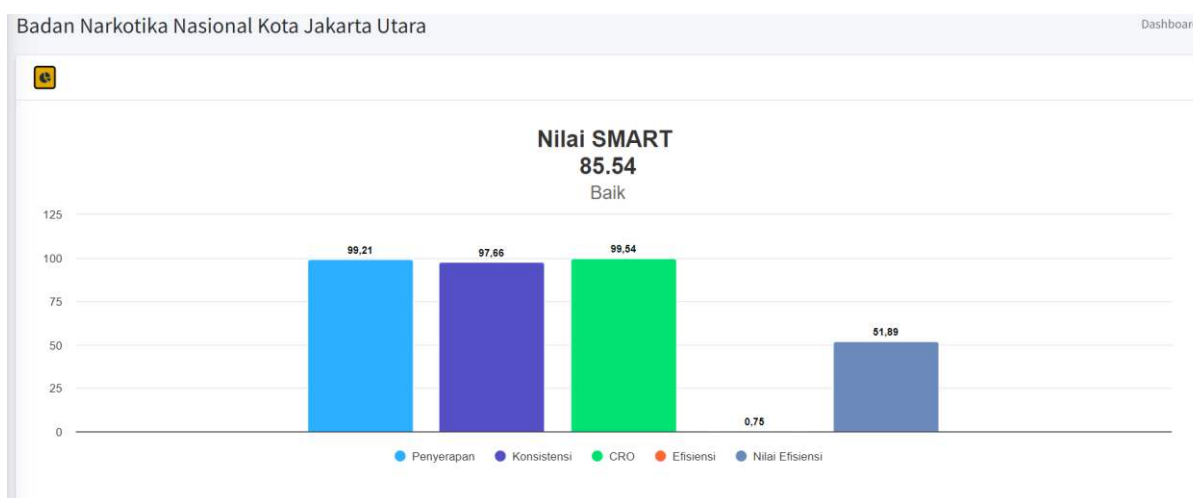
Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkanlah indikator kinerja kegiatan berupa nilai kinerja anggaran sebesar 91.

Tabel 3.17
Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	91	85.54	94,00%

Realisasi nilai kinerja anggaran diatas didapat dari total realisasi dibandingkan dengan target capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 85,54% dengan target capaian 91, dengan demikian capaian target mencapai 94,00%.



Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Tabel 3.18 Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Utara	92	95.91	104,25%

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable : revisi DIPA,deviasi halaman III DIPA,Penyerapan anggaran,pengelolaan UP dan TUP,dispensi SPM dan Capaian Output BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 95,91% dengan target capaian 91, dengan demikian capaian target mencapai 104,25%.

MONEVPA

halchat

BADAN NARKOTIKA...
T.A. 2023

EXCEL

PDF

FILTER

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
088	066	419258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA	Nilai	100.00	62.08	100.00	100.00	100.00	97.75	100.00	99.70	95.91	100%	95.91
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	6.21	20.00	10.00	10.00	9.78	5.00	24.92			
				Nilai Aspek	81.04		99.55					99.70			

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Faktor keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu serta tepat sasaran.

2. Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Keuangan BNN telah tersusun dan disajikan dengan basis akrual (informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel).
4. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Tercapainya pelayanan perkantoran baik dalam penatausahaan, kepegawaian dan pemeliharaan alat olah data.
6. Dukungan dari jajaran Pemda Kota Jakarta Utara yang direalisasikan berupa Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 228 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
7. Terjalinnnya sinergitas antara BNN Kota Jakarta Utara bersama instansi terkait antara Pemda Kota Jakarta Utara, dan jajaran, Imigrasi Jakarta Utara, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dll

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang tugas pengelolaan keuangan.
2. Keterbatasan pelatihan yang didapatkan oleh petugas di bidang pengelolaan keuangan.
3. Tidak sesuai antara pekerjaan di bidang keuangan dengan latar belakang pendidikan petugas.

Rencana aksi langkah ke depan yang akan diambil adalah :

1. Peningkatan koordinasi sesuai dengan bidang tugas.
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba.
3. Pengusulan pendidikan personil BNN Kota Jakarta Utara baik struktural maupun fungsional.

4. Pengusulan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
5. Membangun Team Building dilingkungan BNN Kota Jakarta Utara.
6. Pengusulan penambahan personel mengingat beban kerja yang semakin meningkat yang tentunya berdampak pada penyusunan laporan yang mengawasi harus berimbang.
7. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base yang sudah ada mulai dari perencanaan (e-planning), implementasi, hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), e-monev kemenkeu, e-mindik, monev bappenas, e-sakip reviu,e-kinerja BNN, Dektari BNN & Dektara.bnn.id) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 BNN Kota Jakarta Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.170.250.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 2,208,810,000,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) karna adanya Revisi Anggaran yang bersumber Dari Relaksasi AA (Automatic Adjustment) sebanyak 1 kali dan Revisi Penambahan Pagu PNBPN sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Tahun 2023

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
52 Belanja Barang	Rp 2,105,250,000,-	Rp 2.123.810.000,-	Rp 2,106,418,262,-	Rp 17,391,738,-	
53 Belanja Modal	Rp 65,000,000,-	Rp 85,000,000,-	Rp 85,000,000,-	Rp 0,-	
TOTAL	Rp 2.170.250.000,-	Rp 2,208,810,000,-	Rp 2,191,418,262,-	Rp 17,391,738,-	99,21%

BAB IV PENUTUP

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam upaya pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Jakarta Utara terus diminimalisir dengan segala daya dan upaya.

Partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran aparatur negara agar ikut serta peduli terhadap program P4GN dalam upaya membantu BNN Kota Jakarta Utara mengurangi dan menahan angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara dan bagi para penanggungjawab output kegiatan agar dapat mempedomani jadwal kegiatan (*timeline*) BNN Kota Jakarta Utara yang merupakan landasan bertindak dalam mencapai nilai akuntabilitas kinerja. Atas berkat kerjasama tim yang baik, BNN Kota Jakarta Utara berhasil merealisasikan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditentukan dengan capaian yang baik seperti, Jumlah Institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan realisasi sebanyak 20 (Dua Puluh) institusi/lembaga (capaian 100%), Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan Anti Narkoba dengan realisasi sebanyak 2 institusi/lembaga (capaian 100%), Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi yang operasional dengan realisasi capaian sebesar 166.66%, Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 80 indeks realisasi capaian sebesar 98.33 Indeks (capaian 122.91%), Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 5 orang realisasi capaian sebesar 10 Orang (capaian 200%), Jumlah Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional 3 Fasilitas realisasi capaian sebesar 5 Fasilitas (capaian 166.66 %), Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional dengan target 2 Unit realisasi capaian sebesar 2 Unit (capaian 100%), IKR Nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dengan target 3.2 Indeks realisasi capaian sebesar 3,62 Indeks, IKM Nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi realisasi capaian sebesar 3.89 Indeks (capaian 121.56%), Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan realisasi sebanyak 2 berkas (capaian 200%), Nilai kinerja anggaran BNN dengan realisasi sebesar 85,54 (capaian 94,00%).

Demikian laporan akuntabilitas Kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2023 disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan dan data perbandingan pada penyusunan berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BNN KOTA JAKARTA UTARA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI DKI JAKARTA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
DKI JAKARTA**

Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KOTA
JAKARTA UTARA**

**BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos.,
M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3.2 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.645.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.210.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.186.110.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.15.880.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.88.650.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.97.430.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.20.000.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.920.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.277.405.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan. Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
DKI JAKARTA**

Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KOTA
JAKARTA UTARA**

**BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos.,
M.Si**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

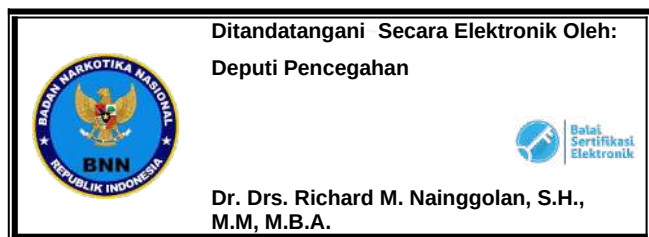
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAkan	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

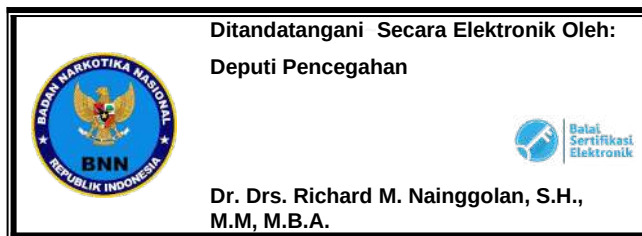
NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANJAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

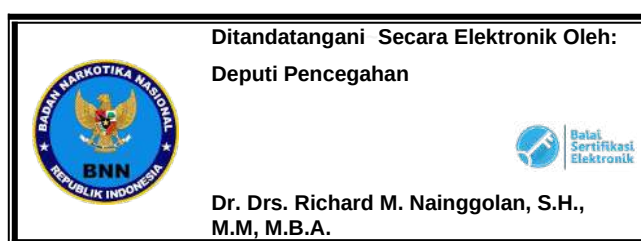
1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

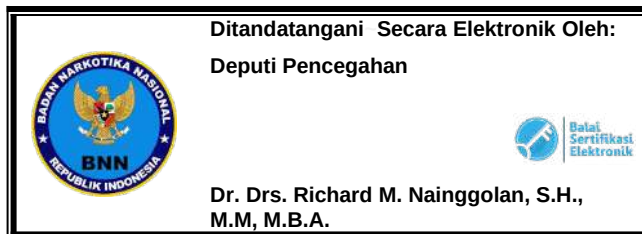
LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Emindik

Aa Nugraha, S.Kom.

BNN Kota Jakarta Utara
Penyidik

UBAH PASSWORD

LOGOUT



Berkas Layanan



L **LKN**

SG **Sprin Gas**

SS **Sprin Sidik**

SDT **Sprin Dah Tempat**

SDB **Sprin Dah Badan**

SS **Sprin Sita**

SK **Sprin K...**

☰ Laporan Kasus Narkotika

Filter

Status

Nomor LKN

Waktu Kejadian

Tanggal Penerbitan

Wilayah

BNNK

01-2023 ~ 08-2023

BNNP DKI Jakarta

BNN Kota Jakarta Utara

RESET

CARI

							+	
☐	No.	Status	Wilayah	Nomor LKN	Dibuat	Aksi		
☐	1		BNN Kota Jakarta Utara	LKN/0011-NAR/V/2023/BNN K ... lebih lanjut	Rabu, 17 Mei 2023 15:01 Oleh : Aa Nugraha, S.Kom.	AKSI ▼		
☐	2		BNN Kota Jakarta Utara	LKN/0009-NAR/IV/2023/BNN ... lebih lanjut	Selasa, 04 Apr 2023 12:31 Oleh : Aa Nugraha, S.Kom.	AKSI ▼		



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/ 121 /I/DE/RH.03/2023/BNN

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI BAGI PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 618 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8807:2019 Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/I/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/9.Program

9. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dalam bentuk antara lain pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan mutu layanan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kemampuan kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



DEPUTI REHABILITASI

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
1	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Blang Kejeren
2	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Lhok Bengkuang
3	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Dr. Zuhaini
4	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Bina Assyifa
5	Aceh	BNN Kabupaten Gayo Lues	Puskesmas Kecamatan Blang Jeurangoe
6	Aceh	BNN Kabupaten Pidie	Puskesmas Kembang Tanjung
7	Aceh	BNN Kabupaten Pidie Jaya	Puskesmas Trienggadeng
8	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Al-Fatha
9	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
10	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Seuramoe Mulya Aceh
11	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)
12	Aceh	BNN Kota Langsa	RS Cut Nyak Dhien Langsa
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Azkia
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Rajawali Medika
16	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Peduli (YPAP)
17	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti
18	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Mon Geudong
19	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Darul Mukminin
20	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	UPTD PKM Gandapura
21	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	Klinik Ka Tiga Kuta Blang
22	Aceh	BNN Kabupaten Bireuen	Klinik Dokkes Polres Bireuen
23	Aceh	BNNP Aceh	Rumah Sakit Jiwa
24	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Darul Imarah
25	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Baitussalam
26	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Krueng Barona Jaya
27	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis Ahsana Aceh
28	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Generasi Emas Aceh
29	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara
30	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Bukit Doa Rumahku
31	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	IPWL Pondok Trenkely
32	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Rahmani Kasih
33	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Getsemane
34	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Langkat	RSUD Tanjung Pura

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
35	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Mandailing Natal	RSUD Panyabungan
36	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Puskesmas Tanjung Beringin
37	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Narkotika Jopan
38	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan
39	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Keris Sakti
40	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Yayasan Mutiara Abadi Binjai
41	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Yayasan Rumah Sehat Harapan
42	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Yayasan Haga Christ
43	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa
44	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Asia Treatment Centre (ATC)
45	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Puskesmas Kampung Persatuan
46	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Asahan	Yayasan Amanah Nusantara Bersinar
47	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Rumah Mahira Kota Pinang
48	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Sungai Jordan Kasih
49	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Simalungun	Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa
50	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Centre
51	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Peka Medan
52	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar
53	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Mitra Masyarakat Sehat
54	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI)
55	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia
56	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Rehabsos Bahri Nusantara (BANTARA)
57	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem
58	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Nazar
59	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan RSJ Mahoni
60	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Kasih Hati Dan Pikiran
61	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti (74gana Center)
62	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Medan Plus
63	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan RSU Bandung
64	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Caritas PSE
65	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo
66	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Rs TNI Al Dr. Komang Makes Belawan
67	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Glugur Darat
68	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Teladan
69	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Padangbulan
70	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Santu Yosef "Rumah Kita"

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
71	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Klinik Arisha
72	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Solok	Puskesmas Singkarak
73	Sumatera Barat	BNN Kabupaten Solok	Puskesmas Alahan Panjang
74	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati
75	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Yayasan Generasi Muda Payakumbuh
76	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto
77	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSI Silungkang
78	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Tigo Baleh
79	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Pasar Usang
80	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Gunung
81	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Yayasan Karunia Insani
82	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari
83	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Aisyah
84	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	IPWL Puskesmas Pemali Babel
85	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Puskesmas Sinar Baru
86	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	IPWL Dharma Wahyu Insani Bangka Belitung
87	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Yayasan Pendaki Sehati Bangka Belitung
88	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka	Puskesmas Sungailiat
89	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	Puskesmas Tiram
90	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	UPT Puskesmas Toboali
91	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	UPT Puskesmas Air Gegas
92	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Bangka Selatan	Klinik Suci Medika
93	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Air Saga
94	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Tanjung Binga
95	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	UPT Puskesmas Badau
96	Bangka Belitung	BNN Kabupaten Belitung	Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan
97	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Tamansari
98	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Pangkalbalam
99	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPT Puskesmas Rias
100	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	UPTD Puskesmas Gerunggang
101	Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Puskesmas Melintang
102	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Namang
103	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kelapa Kampit
104	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Muntok
105	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Tempilang
106	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
107	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Perlang
108	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Petaling

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
109	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kacang Pedang
110	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Biddokkes Polda Kep. Bangka Belitung
111	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	IPWL Wado Health Care Babel Foundation
112	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Pasir Putih
113	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Baturusa
114	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Sungai Selan
115	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Kelapa
116	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPT Puskesmas Perawas
117	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Lubuk Besar
118	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Koba
119	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang
120	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	UPTD Puskesmas Air Itam
121	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Puskesmas Benteng
122	Bangka Belitung	BNNP Bangka Belitung	Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang
123	Kepulauan Riau	BNN Kabupaten Karimun	RSUD Muhammad Sani
124	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Klinik Global Medical Centre
125	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kimia Farma 109
126	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Yayasan Karsa Tanjung Pinang
127	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Yayasan Eka Kapti Abhipraya
128	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang
129	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang
130	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Siklus
131	Riau	BNN Kota Pekanbaru	IPWL Yayasan Rumah Solid
132	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan
133	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi
134	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Rumah Rehab Geliat Pelangi Nusantara
135	Riau	BNN Kota Dumai	Yayasan Gemuni Cabang Dumai
136	Riau	BNNP Riau	Rehabilitasi Narkotika Quranic Healing Indonesia
137	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang
138	Riau	BNNP Riau	RSJ Tampian Provinsi Riau
139	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu
140	Riau	BNNP Riau	Rumah Aman Napza TB Satu Riau
141	Riau	BNNP Riau	IPWL Mercusuar Riau
142	Riau	BNNP Riau	Yayasan Gemuni
143	Riau	BNNP Riau	Bapas Kelas II Pekanbaru
144	Bengkulu	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah Manna
145	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	PKM Padang Serai
146	Bengkulu	BNNP Bengkulu	IPWL Dharma Wahyu Insani Bengkulu
147	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi Kota Bengkulu
148	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Female

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
149	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Yayasan Peduli Sosial Nasional (Pesona)
150	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSUD Bhayangkara
151	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSUD Kepahiang
152	Bengkulu	BNNP Bengkulu	RSKJ Soeprapto
153	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Anggut
154	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Pasar Kepahiang
155	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Basuki Rahmat
156	Bengkulu	BNNP Bengkulu	PKM Pasar Ikan
157	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	RS Mitra Medika Batang Hari
158	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat
159	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Durian Luncuk
160	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas
161	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam
162	Jambi	BNN Kabupaten Batang Hari	UPT Puskesmas Sungai Rengas
163	Jambi	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan
164	Jambi	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut
165	Jambi	BNN Kota Jambi	Kanti Sehati Sejati Jambi
166	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang
167	Jambi	BNNP Jambi	Yayasan Sahabat Jambi
168	Jambi	BNNP Jambi	RS Jiwa Daerah Jambi
169	Jambi	BNNP Jambi	Instalasi Rehabilitasi Ketergantungan Napza RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun
170	Jambi	BNNP Jambi	IPWL Al Jannah
171	Jambi	BNNP Jambi	Yayasan Karunia Insani
172	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Muara Enim	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Rumah Antara
173	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	IPWL Karunia Insani Musi Rawas
174	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti
175	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Musi Rawas	Puskesmas L. Sidoharjo
176	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Ilir	Klinik Pondok Pesantren Al Ittifaqiyah
177	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Ilir	Yayasan Cahaya Putra Tunggal
178	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Ogan Komering Ilir
179	Sumatera Selatan	BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	IPWL Bina Sriwijaya Persada
180	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Yayasan Karunia Insani Lubuk Linggau
181	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	PKM Simpang Periuk
182	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Puskesmas Citra Medika
183	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	IPWL Bersama Kita Bisa
184	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Bina Sriwijaya Persada Rumah Pemulihan Kota Prabumulih
185	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Mitra Mulia Unit Musi Bersinar
186	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	IPWL Dharma Wahyu Insani Palembang

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
187	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman
188	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Cahaya Putra Selatan
189	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Mitra Mulia Banyuasin
190	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
191	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	IPWL Puskesmas Kertapati
192	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	IPWL Puskesmas Boom Baru
193	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Yayasan Cahaya Putra Selatan - Rumah Kita Sekayu
194	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuasin
195	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lapas Perempuan Kelas II A Palembang
196	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Lapas Kelas I Palembang
197	Lampung	BNN Kabupaten Way Kanan	Yayasan Rehabilitasi Alza Bersinar Way Kanan
198	Lampung	BNNP Lampung	Waruga Djaya Sampurna (Waras Foundation)
199	Lampung	BNNP Lampung	Rumah Rehabilitasi House Of Serenity
200	Lampung	BNNP Lampung	Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Dan Narkoba Wisma Ataraxis
201	Lampung	BNNP Lampung	RSJ Daerah Lampung
202	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
203	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati
204	Lampung	BNNP Lampung	RSUD Pringsewu
205	Lampung	BNNP Lampung	RSUD Ahmad Yani
206	Lampung	BNNP Lampung	Puskesmas Simpur
207	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Bandar Negara Husada
208	Lampung	BNNP Lampung	Puskesmas Gedong Air
209	Lampung	BNNP Lampung	RS.Panti Secanti
210	Lampung	BNNP Lampung	Lapas Narkotika Kls IIA
211	Lampung	BNNP Lampung	Lapas Wanita
212	Banten	BNN Kota Cilegon	Klinik Tazkiyah
213	Banten	BNN Kota Cilegon	RSIA Mutiara Bunda
214	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Jalan Emas
215	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Cipondoh
216	Banten	BNN Kota Tangerang	Yasibara
217	Banten	BNN Kota Tangerang	Bersama Kita Berkarya (Berkibar)
218	Banten	BNN Kota Tangerang	Puskesmas Cibodasari
219	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LP Kelas IIA Pemuda
220	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LP Kelas I Tangerang
221	Banten	BNN Kota Tangerang	UPT LPP Kelas IIA Tangerang
222	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Galigo Institute
223	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat
224	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Yayasan Matahati Adiksi Indonesia
225	Banten	BNNP Banten	Bani Syifa
226	Banten	BNNP Banten	Yayasan Assifa Amalindo Pratama
227	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
228	Banten	BNNP Banten	Lapas Kelas IIA Serang
229	Banten	BNNP Banten	Lapas Kelas IIA Cilegon
230	Banten	BNNP Banten	Rutan Kelas IIB Serang
231	Banten	BNNP Banten	Bapas Serang
232	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Sahabat Rekan Sebayu
233	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati
234	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani
235	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Sapu Jagad
236	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Yayasan Balarenik
237	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Rumah Karitas Sani Madani
238	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Yayasan Kelima Mandiri
239	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta timur	Madani Mental Health Care
240	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Yayasan Emas Pengharapan Indonesia
241	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati
242	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora
243	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Gambir
244	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Jatinegara
245	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kelurahan Ancol
246	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng
247	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cilandak
248	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading
249	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
250	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen
251	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit
252	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
253	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru
254	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	RSKD Duren Sawit
255	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	RSUD Kemayoran
256	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok
257	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia
258	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kapeta
259	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Pusaka
260	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Palmerah
261	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	BLUD Puskesmas Kecamatan Penjaringan
262	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Bersama Kita Pulih
263	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Harapan Permata Hati Kita
264	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa
265	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Pelayanan Agape
266	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Breakthrough Missions Indonesia
267	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus Bogor)

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
268	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia
269	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi
270	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara
271	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Inabah II Puteri
272	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya Putra XVIII
273	Jawa Barat	BNN Kabupaten Ciamis	Yayasan Ar Rahmaniyyah
274	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Yayasan Pengasih Insan Karima
275	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Galigo Institute
276	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Yayasan Penuai Indonesia
277	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	LKS Societa Indonesia
278	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Cahaya Nusantara Yumadani
279	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Inabah 14 Garut
280	Jawa Barat	BNN Kabupaten Garut	Puskesmas Cipanas Garut
281	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	Puskesmas Karawang
282	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RS Islam Karawang
283	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RS Izza
284	Jawa Barat	BNN Kabupaten Karawang	RSUD Karawang
285	Jawa Barat	BNN Kabupaten Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut Rutela
286	Jawa Barat	BNN Kabupaten Kuningan	Cipta Wening
287	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara
288	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba
289	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sukabumi	Yayasan Cakra Sehati Sukabumi
290	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sumedang	Pradita Madani Cempaka Cabang
291	Jawa Barat	BNN Kabupaten Sumedang	Klinik Utama Sehat Mulia
292	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Yayasan Lingkar Nadi Bumi
293	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Sekar Mawar
294	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Salam
295	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Margahayu Raya
296	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Babakan Sari
297	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cibiru
298	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cibuntu
299	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cinambo
300	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie
301	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kopo
302	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kujang Sari
303	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Pasirkaliki
304	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sarijadi
305	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sukarasa
306	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Tamansari
307	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah
308	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Cipamokolan
309	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Babatan
310	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Griya Antapani
311		BNN Kota Bandung	Lik Sadulur
312	Jawa Barat	BNNK Bandung Barat	Puskesmas Jayagiri

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
313	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RS Mitra Anugerah Lestari
314	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi
315	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Yayasan Pambudi Luhur 1976
316	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Yayasan Rumah Pemulihan Dinamika
317	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan
318	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Drajat
319	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Jagasatru
320	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Cangkol
321	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean
322	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Gunung Sari
323	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Pulasaren
324	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Yayasan Bina Insan Mandiri
325	Jawa Barat	BNN Kota Depok	LSM Yafuz Etpaf Indonesia
326	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Rutan Kelas I Depok
327	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kahuripan
328	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cilembang
329	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cihideung
330	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Inabah XXVII
331	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi
332	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara
333	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Ponpes Nurul Jannah At Taubah
334	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan l'anatul Barokah Pondok Ilir Ilir
335	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera
336	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi
337	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Lapas Narkotika Klas IIA Kabupaten Bandung
338	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Penta Cipta Sanggraha
339	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	UPT Puskesmas Kasokandel
340	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	UPT Puskesmas Malausma
341	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi
342	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon
343	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat
344	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RS Nur Hidayah
345	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati
346	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Puskesmas Kasihan 2
347	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Yayasan Anugerah Tuhan Hafara
348	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	PABM Nawacita
349	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Pondok Pesantren Bidayatussalikin
350	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSUD Sleman
351	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSU Mitra Paramedika
352	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
353	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RS Condongcatur
354	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	RS Bethesda

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
355	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Mergangsan
356	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Gondomanan
357	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Tegalrejo
358	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	IPWL Pondok Pemulihan Elkana
359	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Pondok Pesantren Al Islamy
360	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Yayasan Indocharis
361	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	IPWL Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta
362	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Yayasan Rehabilitasi Kunci
363	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Wates
364	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Kota Yogyakarta
365	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSPAU Dr. S. Hardjolukito
366	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	RSUD Wonosari
367	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah
368	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Satria" Baturaden
369	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo
370	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSUD Banyumas
371	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	RSU Siaga Medika Banyumas
372	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Batang	Rs. H.A Zaky Djunaid
373	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Klinik Karlina
374	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Sampang
375	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Cilacap	Yayasan Assalam Cilacap Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkotika Tambihul Ghofilin
376	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Magelang	RS. Aisiyyah Muntilan
377	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda
378	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono
379	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Purbalingga	Klinik Rawat Inap H.Mustajab
380	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Klinik Pratama Imran Medika
381	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	IPWL Anargya Sober House
382	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	IPWL Cahaya Kusuma Bangsa
383	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
384	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Moewardi
385	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD Jiwa Daerah Surakarta
386	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Yayasan Al Ma'la Cabang Kota Tegal
387	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Muhamadiyah Aisyah Kota Tegal (Klinik Pratama Aisyah Siti Hajar)
388	Jawa Tengah	BNNK Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung
389	Jawa Tengah	BNNK Temanggung	RSUD Kab. Temanggung
390	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RS Bhayangkara Semarang
391	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Wisma Baladewa, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
392	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
			Provinsi Jawa Tengah
393	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	RSJD Dr.RM Soedjarwadi
394	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Lentera Bangsa Indonesia
395	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran
396	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Rumah Damai
397	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan At-Tauhid
398	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Maunatul Mubarak
399	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Jati Kusumo (LKS Darul Hakim)
400	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Ayodya Mandiri Jepara
401	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Pondok Pemulihan Elkana Semarang
402	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	PRS Napza Al-Ma"La Grobogan
403	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar
404	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Dinas Kesehatan Tentara Gombong Kebumen
405	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Semarang
406	Jawa Timur	BNN Kabupaten Blitar	RSU An-Nisaa'
407	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	RS Fathma Medika
408	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	RSUD Ibnu Sina Kab Gresik
409	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	Yayasan Rumah Rehabilitasi Napza Suprisoli
410	Jawa Timur	BNN Kabupaten Lumajang	UPT Puskesmas Klakah
411	Jawa Timur	BNN Kabupaten Lumajang	UPT Puskesmas Jatiroto
412	Jawa Timur	BNN Kabupaten Malang	RSJ Dr. Radjiman Wedyoningrat, Lawang
413	Jawa Timur	BNN Kabupaten Malang	Hayunanto Medical Center
414	Jawa Timur	BNN Kabupaten Pasuruan	RSUD Bangil
415	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (Kobra)
416	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara
417	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Rumah Merah Putih
418	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Yayasan Ponpes Al Kholiqi
419	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Dasuk
420	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Batang-Batang
421	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Puskesmas Guluk-Guluk
422	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	RSUD Dr.R Koesma Kab Tuban
423	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	Puskesmas Tuban
424	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tuban	Klinik Ar Rochma
425	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	Trisna Health Voluntary Center
426	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya
427	Jawa Timur	BNN Kabupaten Tulungagung	RSUD DR.Iskak
428	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu
429	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos
430	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RSU Karsa Husada
431	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation
432	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Pusat Rehabilitasi Napza RSUD Dr.Saiful Anwar Malang (RSSA)

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
433	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari
434	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan
435	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS. Kamar Medika
436	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation
437	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Bambu Nusantara
438	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit
439	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur
440	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Klinik Kesehatan dan Ketergantungan Obat Ghana Prima
441	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Rumah Singgah KP2M
442	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	IPWL LRPPN-BI Banyuwangi
443	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Rumah Rehabilitasi Narkoba Al Hidayat
444	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Yayasan Gendhog Nemu Sariro (Gennesa) Banyuwangi
445	Bali	BNN Kabupaten Badung	RSUD Mangusada Badung
446	Bali	BNN Kabupaten Badung	UPTD Puskesmas Kuta 1
447	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung
448	Bali	BNN Kabupaten Buleleng	RSUD Buleleng
449	Bali	BNN Kabupaten Buleleng	Lapas Klas II B Singaraja
450	Bali	BNN Kota Denpasar	RSUD Wangaya
451	Bali	BNN Kota Denpasar	Yayasan Anargya
452	Bali	BNN Kota Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali
453	Bali	BNN Kabupaten Badung	Yayasan Musim Indonesia
454	Bali	BNN Kabupaten Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali
455	Bali	BNN Kabupaten Gianyar	Lapas Narkotika Klas IIA Bangli
456	Bali	BNN Kabupaten Gianyar	Rumah Tahanan Negara Klas IIB
457	Bali	BNN Kabupaten Karangasem	RSUD Karangasem
458	Bali	BNN Kabupaten Karangasem	Klinik Lapas Kelas IIB Karangasem
459	Bali	BNNP Bali	Friends Mental Health Support
460	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia Bali
461	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali
462	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Denpasar
463	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara
464	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali
465	Bali	BNNP Bali	Yayasan Ashefa Griya Pusaka
466	Bali	BNNP Bali	Yayasan Satu Nusa
467	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian
468	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia
469	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Gepsan
470	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	West Borneo Action
471	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan RBM Khatulistiwa
472	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN)
473	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak
474	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Purnama
475	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Saigon
476	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Siantan Tengah

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
477	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Perumnas 1
478	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Alianyang
479	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	UPT Puskesmas Kampung Bangka
480	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rehabilitasi Kita
481	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Lsm Kelompok Saling Bantu (Kesatu)
482	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Wisma Koala RSJ Prov Kalimantan Barat
483	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Bengkayang	RSU Bethesda Serukam
484	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Mempawah	Poli Klinik Napza, RSUD dr Rubini Mempawah
485	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Mempawah	Poli Klinik Bestari Puskesmas Rawat Jalan Anjungan
486	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sintang	RSUD M.DJOEN
487	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sanggau	RSU Parindu
488	Kalimantan Barat	BNN Kabupaten Sanggau	RSUD M.Th. Djaman
489	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female Kab. Melawi
490	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi
491	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas
492	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RSUD Bumi Seballo Bengkayang
493	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Sakit Parindu
494	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Tarbiyatul Furqan
495	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	RS. Abdul Aziz Marabahan
496	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Puskesmas Berangas
497	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Arrohmah
498	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	RS Ceria
499	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	RS Mulia Amuntai
500	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Tabalong	Puskesmas Mabuun
501	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Tabalong	PKM Muara Harus
502	Kalimantan Selatan	BNN Kabupaten Balangan	PKM Lampihong
503	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Yayasan Griya Pemberdayaan (YGP)
504	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka
505	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas S. Parman
506	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	UPTD Puskesmas Teluk Tiram
507	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Kelayan Timur
508	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Alalak Selatan
509	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Sungai Jingah
510	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Psikomedika Kalimantan
511	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Jaya
512	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul, Rantau
513	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebambar II
514	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati, Tanah Laut
515	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Pantai Hambawang, HST
516	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Puskesmas Barabai, HST
517	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Klinik Simpang, Tanah Bumbu

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
518	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak, HST
519	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	RS. Mutiara Bunda
520	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Pahandut
521	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Menteng
522	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Puskesmas Panarung
523	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RS. Bhayangkara Tk III Palangka
524	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Biddokkes Polda Kalteng
525	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJD Kalawa Atei
526	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Jaraga Sasameh, Kab. Barito
527	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito
528	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun, Kabupaten Gunung
529	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas
530	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan
531	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. Murjani Sampit
532	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang
533	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang
534	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangkaraya
535	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan
536	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah
537	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1
538	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	RSUD Taman Husada Bontang
539	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Samarinda
540	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Sangatta Selatan
541	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Penajam
542	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga
543	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam
544	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf Sk Tarakan
545	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita)
546	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu
547	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas
548	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping
549	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu
550	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Selor
551	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan
552	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota
553	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Seberang
554	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Sapi
555	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
556	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale
557	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika
558	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pekkabata
559	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba
560	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Majene
561	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale
562	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Mamuju Tengah
563	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Pasangkayu
564	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Pelitakan
565	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan
566	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Sarjo
567	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu
568	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Mamuju
569	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo
570	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	RSUD Polewali Mandar
571	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Pukesmas Sendana 1
572	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangas
573	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang
574	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga
575	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia
576	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	RSUD Tenriawaru
577	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Bone	Puskesmas Watampone
578	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda
579	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Puskesmas Talunglipu
580	Sulawesi Selatan	BNN Kabupaten Tana Toraja	Puskesmas Makale
581	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	RS Mujaisyah
582	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	Rumah Rehab Hati Kota Palopo
583	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	RSUD Sawerigading Kota Palopo
584	Sulawesi Selatan	BNN Kota Palopo	Puskesmas Wara Utara Kota Palopo
585	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros
586	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawoi, Kab. Sidrap
587	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo, Kab. Gowa
588	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kaluku Bodoa, Kota Makassar
589	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
590	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
591	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Pranawaksara Nusantara
592	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada
593	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Lapas Narkotika Kls IIA Pria, Sungguminasa
594	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Lapas Narkotika Kls IIA Wanita, Sungguminasa
595	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIA, Makassar
596	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIB, Kab Pinrang
597	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rutan Kls IIB, Kab Janeponto
598	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Sigi
599	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	UPT RSUD Mokoyurli Buol

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
600	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Lapas Kelas IIA Palu
601	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Pratama RMC Medical Centre
602	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSUD Anutapura Palu
603	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Klinik Agung
604	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSUD Kolonedale
605	Sulawesi Tenggara	BNN Kabupaten Kolaka	Puskesmas Kolakaasi
606	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Puskesmas Poasia
607	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Puskesmas Mokoau
608	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	ORC Noid
609	Sulawesi Tenggara	BNN Kabupaten Kolaka	Rutan Klas IIB Kolaka
610	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana
611	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan
612	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur
613	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo
614	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	LapasKelas IIA Kendari
615	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari
616	Sulawesi Utara	BNN Kabupaten Sangihe	LRM Kadademahe
617	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Yayasan Manado Waras "Panti Rehabilitasi Gerasa"
618	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Yayasan Sahabat Sehati
619	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Yayasan Batamang Plus
620	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	IPWL Kalooran
621	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung
622	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Klas IIA Manado
623	Gorontalo	BNNP Gorontalo	IPWL Ummu Syahidah
624	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Lapas Kelas II A Kota Gorontalo
625	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	RSUD Bima
626	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	Puskesmas Sape Plus
627	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Bima	Puskesmas Woha
628	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa	RS. H. L. Manambai Abdul Kadir
629	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	UPTD Puskesmas PotoTano
630	Nusa Tenggara Barat	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	UPTD Puskesmas Maluk
631	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK Paramita)
632	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	RSUD Dr. R Soedjono Selong
633	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Aksi NTB
634	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Yayasan Lentera Mataram
635	Nusa Tenggara Barat	BNNP Nusa Tenggara Barat	Lapas Kelas II A Mataram
636	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Delha
637	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Ba'a
638	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Korbafu
639	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Rote Ndao	Puskesmas Eahun
640	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Belu	Puskesmas Umanan
641	Nusa Tenggara Timur	BNN Kabupaten Belu	Puskesmas Kota Atambua
642	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental
643	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Klinik King Care

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
644	Nusa Tenggara Timur	BNN Kota Kupang	Puskesmas Oebobo
645	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	UPT RSJ Naimata Kupang
646	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	Yayasan Lentera Mitra Harapan
647	Nusa Tenggara Timur	BNNP Nusa Tenggara Timur	Yayasan Warna Kasih
648	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Hutumuri
649	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Tawiri
650	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Waihaong
651	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Passo
652	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Perawatan Pelauw
653	Maluku	BNNP Maluku	RSUD Dr.H. Ishak Umarela
654	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Karang Panjang Ambon
655	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
656	Maluku	BNNP Maluku	Puskesmas Poka Rumah Tiga
657	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
658	Maluku	BNNP Maluku	Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku
659	Maluku Utara	BNN Kabupaten Pulau Morotai	RSUD Ir. Soekarno
660	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	UPT Puskesmas Ranap Ome
661	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	RSD Tidore Kepulauan
662	Maluku Utara	BNN Kabupaten Tidore Kepulauan	UPT Puskesmas Soasio
663	Maluku Utara	BNN Kota Ternate	Wasana Bahagia
664	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD H. Chasan Boesoirie
665	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Weda
666	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Jailolo
667	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Maba
668	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	BLUD Labuha
669	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	RSUD Sanana
670	Maluku Utara	BNNP Maluku utara	Puskesmas Kalumata
671	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Lapas Kls IIA Ternate
672	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Puskesmas Sentani
673	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Puskesmas Harapan
674	Papua	BNN Kabupaten Jayapura	Lapas Narkotika Kls IIA Jayapura
675	Papua	BNN Kabupaten Mimika	RSUD Mimika
676	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Timika Jaya
677	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Wania
678	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Rumah Sakit Mitra Masyarakat
679	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Klinik Puri Husada
680	Papua	BNN Kabupaten Mimika	Puskesmas Timika
681	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo
682	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka
683	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Timur PIR IV
684	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso 3 Kabupaten Keerom
685	Papua	BNNP Papua	PKM Arso Kota Kab. Keerom
686	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga Kab. Keerom

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
687	Papua	BNNP Papua	PKM Jayapura Utara
688	Papua	BNNP Papua	PKM Tanjung Ria
689	Papua	BNNP Papua	Yayasan Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat Papua & Papua Barat
690	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Lmbi
691	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano
692	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja
693	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw
694	Papua	BNNP Papua	Bapas Jayapura
695	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSUD Kabupaten Raja Ampat
696	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Yayasan Kasih Agape Malainsimsa Kota Sorong

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

a.n **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DEPUTI REHABILITASI



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/ 214 /II/DE/RH.03/2023/BNN

TENTANG

**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA**

TAHAP PERTAMA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;

11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran II sebagai unit IBM terbentuk tahun 2022 yang dibina dan didampingi oleh petugas pendamping di satuan kerja BNNP & BNNK/Kota.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
DEPUTI REHABILITASI



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
15	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
16	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
17	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
18	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tongah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
20	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
21	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
22	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
23	Riau	BNNP Riau	Desa Semunai	Pinggir	Kabupaten Bengkalis
24	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Perawang	Tualang	Kabupaten Siak
25	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Kuantan Singingi
26	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Gunung Kesiangan	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
27	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mulya Subur	Pangkalan Lesung	Kabupaten Pelalawan
28	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Ogung	Bandar Seikijang	Kabupaten Pelalawan
29	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Baru	Binawidya	Kota Pekanbaru
30	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Tiga	Bukit Raya	Kota Pekanbaru
31	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai	Dumai Timur	Kota Dumai
32	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bagan Besar	Bukit Kapur	Kota Dumai
33	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
34	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
35	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Desa Senaning	Pemayung	Kabupaten Batang Hari
36	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
37	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
38	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendagung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
39	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
40	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Tanah Periuk	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Kelurahan Muara Lakitan	Muara Lakitan	Kabupaten Musi Rawas
42	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
43	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
44	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
45	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
46	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
47	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
48	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
49	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
50	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
51	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
52	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
53	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
54	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
55	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
56	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
57	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Dukong	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung
58	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Tanjung Binga	Sijuk	Kabupaten Belitung
59	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
60	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Tanjung Ketapang	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
61	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kelurahan Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam
62	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Desa Sebong Lagoi	Teluk Sebong	Kabupaten Bintan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
63	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Patam Lestari	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Sei Harapan	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
65	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Batu IX	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
66	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Bukit Cermin	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
67	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
69	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur	Kota Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
70	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Batu Lambang	Pasar Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
78	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
79	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
80	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
81	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Sawah Baru	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
82	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikera	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
84	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
85	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Karawaci Baru	Karawaci	Kota Tangerang
86	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
93	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
94	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasirna	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
95	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
96	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibatua	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
97	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
98	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
99	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Ratu Jaya	Cipayung	Kota Depok
100	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
101	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
102	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut
103	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
106	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candirototo	Kecamatan Candirototo	Kabupaten Temanggung
110	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudioprajan	Jebres	Kota Surakarta
111	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
114	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Pekauman	Tegal Barat	Kota Tegal
115	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Keturen	Tegal Selatan	Kota Tegal
116	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
117	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
118	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan	Batang	Kabupaten Batang
119	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
120	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Gumilir	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
121	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Mertasinga	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
122	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
123	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
124	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
125	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
126	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
127	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
128	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
129	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sariharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
130	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
131	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
132	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
133	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
134	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
135	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Punten	Bumiaji	Kota Batu
136	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
137	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
138	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
139	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
140	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
141	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
142	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
143	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
144	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
145	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
146	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
147	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
148	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
149	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
150	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
151	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
152	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedungdoro	Tegalsari	Kota Surabaya
153	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang
154	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
155	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
156	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
157	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
158	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
159	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
160	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
161	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Ukoi	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
162	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
163	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
164	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
165	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
166	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
167	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
168	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
169	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
170	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
171	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
172	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
173	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
174	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
175	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
176	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
177	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karangan Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
178	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
179	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
180	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
181	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
182	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang
183	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
184	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
185	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
186	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebengkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
187	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
188	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
189	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
190	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadai	Mare	Kabupaten Bone
193	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
194	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
195	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Wawotobi	Wawotobi	Kabupaten Konawe
196	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalosabila	Wawotobi	Kabupaten Konawe
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Lasalepa	Lasalepa	Kabupaten Muna
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Masalili	Kontunaga	Kabupaten Muna
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Tikonu	Wundulako	Kabupaten Kolaka
200	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Pelambua	Pomalaa	Kabupaten Kolaka
201	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Puwatu	Puwatu	Kota Kendari
202	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Anduonohu	Poasia	Kota Kendari
203	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Wale	Wolio	Kota Baubau
204	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Lanto	Batupoaro	Kota Baubau
205	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Binanga	Mamuju	Kabupaten Mamuju
206	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Karossa	Desa Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Muhajirin	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Pandanga	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Goto	Tidore	Kota Tidore Kepulauan
210	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur	Kota Tidore Kepulauan
211	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawan	Bangli	Kabupaten Bangli
212	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Bebalang	Bangli	Kabupaten Bangli
213	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
214	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
215	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Serongga	Gianyar	Kabupaten Gianyar
216	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bedulu	Blahbatuh	Kabupaten Gianyar

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
217	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
218	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Subagan	Karangasem	Kabupaten Karangasem
219	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	Kabupaten Klungkung
220	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Kusamba	Dawan	Kabupaten Klungkung
221	NTT	BNNP NTT	Kelurahan Sikumana	Maulafa	Kota Kupang
222	NTT	BNNP NTT	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
223	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Beirafu	Atambua Barat	Kabupaten Belu
224	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Napan	Bikomi Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
225	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Oebufu	Kecamatan Oebobo	Kota Kupang
226	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Pasir Panjang	Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang
227	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Sedoeen	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
228	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Boa	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
229	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Selatan	Duhiadaa	Kabupaten Pohuwato
230	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Dulangeya	Botumoito	Kabupaten Boalemo
231	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Polohungo	Dulupi	Kabupaten Boalemo
232	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Moodu	Kota Timur	Kota Gorontalo
233	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tapa	Sipatana	Kota Gorontalo
234	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Kramat	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
235	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Luwohu	Botupingge	Kabupaten Bone Bolango
236	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Luh	Telaga	Kabupaten Gorontalo
237	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Kelurahan Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
238	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Moluo	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
239	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Katialada	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
240	Papua	BNNP Papua	Kampung Skouw Yambe	Muara Tami	Kota Jayapura
241	Papua	BNNP Papua	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2023

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
2	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
3	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
5	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
6	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
7	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
8	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
9	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
10	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara
11	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
12	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
13	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
14	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nglegok	Kabupaten Blitar
15	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
16	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
20	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
21	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Teluk Lingga	Sangatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
22	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
23	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Kampung Buyang	Mariso	Kota Makassar
24	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Barombong	Kabupaten Gowa
25	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Kadia	Kadia	Kota Kendari
26	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Watonea	Katobu	Kabupaten Muna
27	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kelurahan Watuliandu	Kolaka	Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

NARKOTIKA

Data Partisipan

Pengisi Survei : **dr. Novianti Purnamasari, M.K.M.**

Email : **novisyachreza@gmail.com**

HP : **081282134661**

K / L : **BNN**

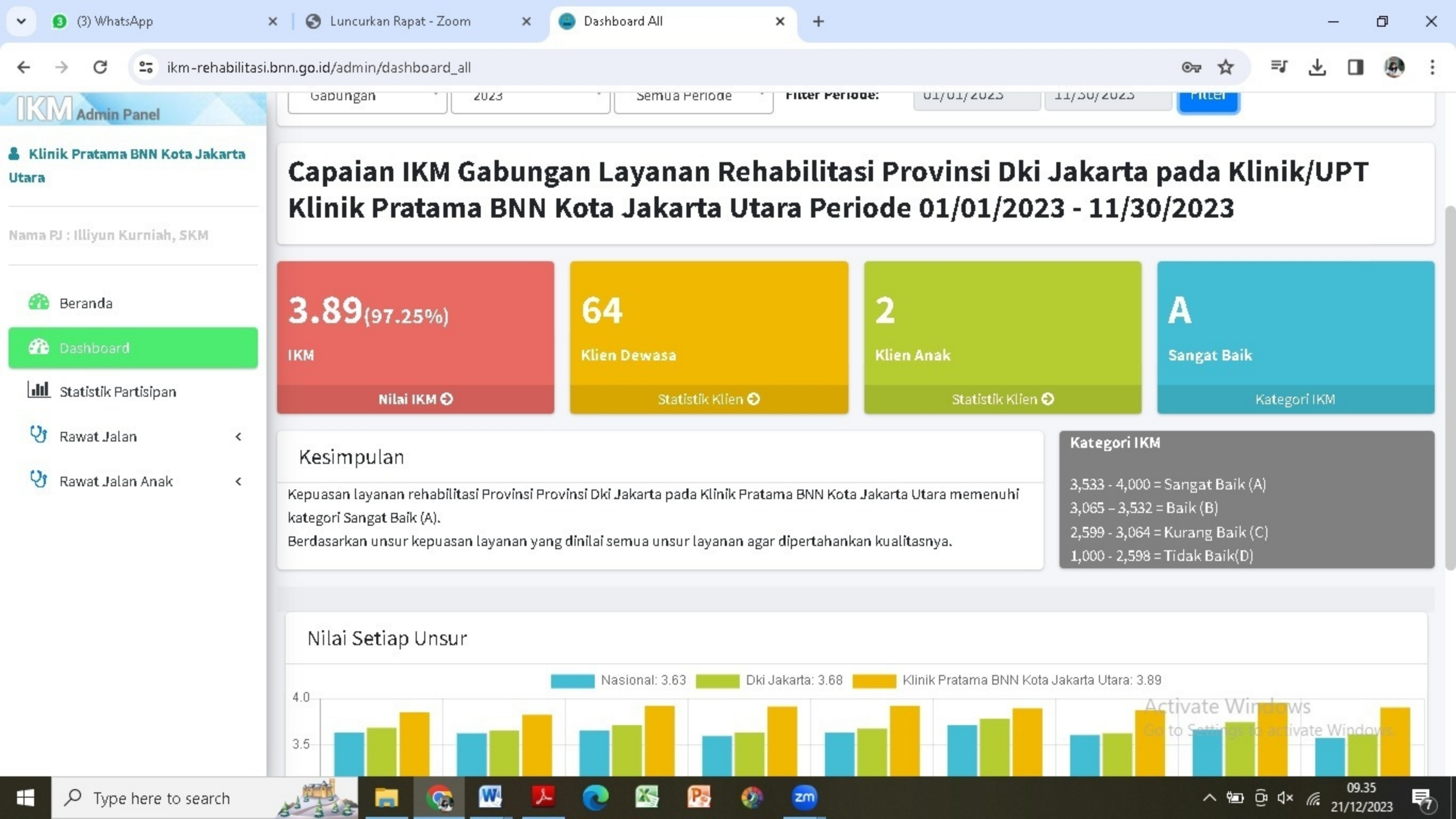
Provinsi : **DKI JAKARTA**

Lembaga : **Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara**

Nilai Survei

Tingkatan IKR	Tahun	
	2022	2023
IKR Nasional	3.25 (81.25%)	3.44 (86%)
IKR BNN	3.31 (82.75%)	3.41 (85.25%)
IKR Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara	3.89 (97.25%)	3.62 (90.5%)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup
T.A 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.

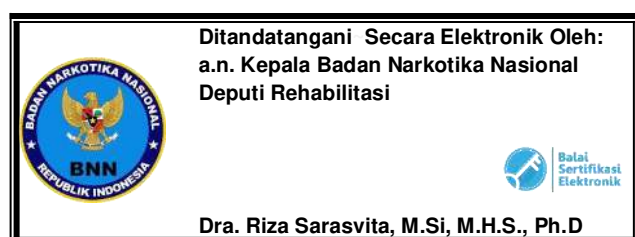
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),
PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN
PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Prosentase Kualitas Hidup
Aceh	3,27	3,67	86.68
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96.59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62.50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90.12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80.00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98.89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92.11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98.00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68.75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87.50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98.21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80.60
Sumatera Utara	3,46	3,52	90.24
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92.22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94.35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88.68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88.61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100.00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81.55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92.50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88.46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91.85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87.78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86.79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90.34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86.21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97.64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89.78
Sumatera Barat	3,32	3,44	64.66
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93.18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47.12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51.47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100.00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56.25

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

Riau	3,24	3,54	80.51
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	2,90	3,66	97.32
BNN Kabupaten Pelalawan	2,68	3,13	92.86
BNN Kota Dumai	3,37	3,69	82.73
BNN Kota Pekanbaru	3,69	3,67	75.00
BNNP Riau	3,57	3,5	69.83
Kepulauan Riau	3,49	3,62	70.69
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3,41	3,57	90.52
BNN Kota Batam	3,26	3,66	88.24
BNN Kota Tanjung Pinang	3,16	3,57	75.83
BNNP Kepulauan Riau	3,62	3,68	60.42
Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,64	84.63
BNN Kabupaten Bangka	3,75	3,53	79.46
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3,76	3,20	76.09
BNN Kabupaten Belitung	3,79	3,71	95.31
BNN Kota Pangkal Pinang	3,45	3,80	98.00
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3,22	3,83	72.22
Bengkulu	3,56	3,76	71.03
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3,04	3,77	73.50
BNN Kota Bengkulu	3,90	3,77	65.77
BNNP Bengkulu	3,76	3,77	78.82
Jambi	3,34	3,63	85.59
BNN Kabupaten Batang Hari	3,52	3,52	96.43
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,31	3,93	93.00
BNN Kota Jambi	3,38	3,42	94.44
BNNP Jambi	3,16	3,89	52.66
Sumatera Selatan	3,24	3,61	76.48
BNN Kabupaten Empat Lawang	3,13	3,52	100.00
BNN Kabupaten Muara Enim	2,98	3,51	75.00
BNN Kabupaten Musi Rawas	3,17	3,64	89.06
BNN Kabupaten Ogan Ilir	3,26	3,54	93.18
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	3,94	61.86
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,75	3,53	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	3,11	3,42	76.96
BNN Kota Pagar Alam	3,49	3,31	80.00
BNN Kota Prabumulih	3,56	3,66	71.30
BNNP Sumatera Selatan	3,56	3,68	62.80
Lampung	3,57	3,63	75.41
BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,45	3,15	72.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3,42	3,59	76.82
BNN Kabupaten Tanggamus	3,80	3,44	73.94
BNN Kabupaten Way Kanan	3,71	3,59	91.80
BNN Kota Metro	3,41	3,38	58.73
BNNP Lampung	3,26	3,85	76.50
Banten	3,20	3,53	77.14

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Cilegon	3,23	3,81	74.29
BNN Kota Tangerang	3,12	3,62	84.62
BNN Kota Tangerang Selatan	3,08	3,58	85.45
BNNP Banten	3,35	3,15	63.30
DKI Jakarta	3,74	3,68	79.40
BNN Kota Jakarta Selatan	3,91	3,76	72.20
BNN Kota Jakarta Timur	3,62	3,21	57.94
BNN Kota Jakarta Utara	3,62	3,89	98.33
BNNP DKI Jakarta	3,86	3,61	82.50
Jawa Barat	3,42	3,54	77.54
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,33	3,36	66.94
BNN Kabupaten Bogor	3,35	3,63	86.40
BNN Kabupaten Ciamis	3,13	3,42	94.53
BNN Kabupaten Cianjur	3,33	3,84	96.43
BNN Kabupaten Garut	3,52	3,72	51.92
BNN Kabupaten Karawang	3,46	3,93	93.45
BNN Kabupaten Kuningan	3,21	3,32	97.12
BNN Kabupaten Sukabumi	4,00	3,52	82.69
BNN Kabupaten Sumedang	3,05	3,4	99.19
BNN Kota Bandung	3,36	3,29	65.91
BNN Kota Cimahi	3,42	3,5	76.39
BNN Kota Cirebon	3,13	3,49	88.03
BNN Kota Depok	3,65	3,55	87.10
BNN Kota Tasikmalaya	3,42	3,41	76.09
BNNP Jawa Barat	3,66	3,52	67.62
Jawa Tengah	3,57	3,67	83.30
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67
D.I.Yogyakarta	3,82	3,86	80.82
BNN Kabupaten Bantul	4,00	3,39	82.42
BNN Kabupaten Sleman	3,46	3,84	79.90
BNN Kota Yogyakarta	0	0	70.45
BNNP D.I.Yogyakarta	4,00	3,83	80.34
Jawa Timur	3,36	3,68	82.28
BNN Kabupaten Blitar	3,60	3,43	68.10
BNN Kabupaten Gresik	3,62	3,77	80.17
BNN Kabupaten Kediri	3,32	3,36	98.57
BNN Kabupaten Lumajang	3,01	3,76	80.95
BNN Kabupaten Malang	3,46	3,52	85.94
BNN Kabupaten Nganjuk	3,33	3,72	70.92

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
Bali	3,17	3,79	90.18
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,81	81.33
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
Nusa Tenggara Timur	3,28	3,78	93.00
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
Kalimantan Barat	3,38	3,57	77.16
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
Kalimantan Selatan	3,44	3,76	89.11
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35

LAMPIRAN II

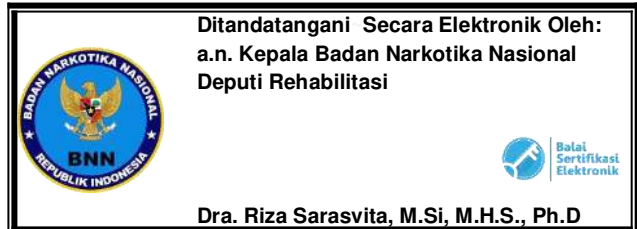
SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Banjarmasin	3,86	3,63	92.55
BNNP Kalimantan Selatan	3,90	3,63	100.00
Kalimantan Tengah	3,60	3,65	69.41
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,66	3,66	67.42
BNN Kota Palangkaraya	3,39	3,42	68.10
BNNP Kalimantan Tengah	3,76	3,81	71.43
Kalimantan Timur	3,61	3,69	77.64
BNN Kota Balikpapan	3,49	3,62	65.91
BNN Kota Bontang	3,70	3,14	82.14
BNN Kota Samarinda	3,80	3,93	83.14
BNNP Kalimantan Timur	3,42	3,51	76.14
Kalimantan Utara	3,49	3,29	88.12
BNN Kabupaten Nunukan	3,51	3,2	75.00
BNN Kota Tarakan	3,43	3,26	95.83
BNNP Kalimantan Utara	3,51	3,36	90.97
Sulawesi Utara	3,42	3,78	85.19
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3,46	3,83	88.33
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,52	3,89	71.67
BNN Kota Bitung	3,07	3,87	99.36
BNN Kota Manado	3,46	3,96	88.79
BNNP Sulawesi Utara	3,60	3,68	76.02
Gorontalo	3,33	3,39	87.76
BNN Kabupaten Boalemo	3,25	3,17	80.00
BNN Kabupaten Bone Bolango	3,90	3,33	99.22
BNN Kabupaten Gorontalo	2,84	3,4	62.50
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	3,80	3,01	85.00
BNN Kota Gorontalo	3,00	3,42	67.50
BNNP Gorontalo	3,19	3,49	87.64
Sulawesi Barat	3,48	3,34	88.16
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3,32	3,23	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3,65	3,38	85.00
Sulawesi Tengah	3,26	3,48	77.38
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	2,70	3,62	50.00
BNN Kabupaten Donggala	2,43	3,43	63.70
BNN Kabupaten Morowali	2,88	3,83	
BNN Kabupaten Poso	3,60	3,18	84.56
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	3,90	3,53	92.35
BNN Kota Palu	3,60	3,35	90.31
BNNP Sulawesi Tengah	3,70	3,46	25.00
Sulawesi Selatan	3,72	3,8	70.45
BNN Kabupaten Bone	3,34	4	75.54
BNN Kabupaten Tana Toraja	4,00	3,73	70.14
BNN Kota Palopo	3,90	3,6	64.66
BNNP Sulawesi Selatan	3,52	3,84	70.83
Sulawesi Tenggara	3,42	3,63	78.37
BNN Kabupaten Kolaka	3,40	3,63	75.60
BNN Kabupaten Muna	2,74	3,05	17.50
BNN Kota Baubau	3,90	3,95	92.24

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76.61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87.50
Maluku	3,26	3,34	86.96
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85.00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85.00
Maluku Utara	3,07	3,36	73.39
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72.92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75.00
Papua	3,38	3,7	75.00
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00
Papua Barat	3,89	3,82	98.75
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98.75
Pusat	3,70	3,43	85.00
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85.00
Grand Total	3,41	3,63	81.39





K8



419258

SATUAN KERJA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

[Beranda](#)

Pernontouan >

 Cetak Laporan

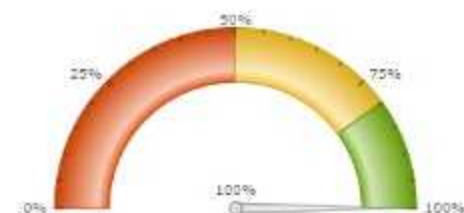
Unduh Excel

[Dashboard](#)

Sebaran Kategori Pelaksanaan
hingga bulan Desember



Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember



📌 Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi **Komponen**

[illegible]

📌 **Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output**

[illegible]

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,208,810,000	0	1,990,765,684	200,652,578	2,191,418,262	99.21 %	17,391,738
BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	760,055,000	0	723,511,758	28,859,242	752,371,000	98.99 %	7,684,000
BL.3247 Penyelenggaraan Advokasi	100,000,000	0	91,580,000	1,600,000	93,180,000	93.18 %	6,820,000
QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	40,000,000	0	39,480,000	0	39,480,000	98.70 %	520,000
QDE.002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	39,480,000	0	39,480,000	98.70 %	520,000
052 Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	39,480,000	0	39,480,000	98.70 %	520,000
052.0A Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	7,460,000	0	7,460,000	0	7,460,000	100.00	0
052.0B Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP	520,000	0	0	0	0	0.00 %	520,000
052.0C Fasilitas Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	32,020,000	0	32,020,000	0	32,020,000	100.00	0
UBB Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa	60,000,000	0	52,100,000	1,600,000	53,700,000	89.50 %	6,300,000
UBB.001 Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	60,000,000	0	52,100,000	1,600,000	53,700,000	89.50 %	6,300,000
052 Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	60,000,000	0	52,100,000	1,600,000	53,700,000	89.50 %	6,300,000
052.0A Koordinasi dalam Rangka Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
052.0B Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	17,200,000	0	15,300,000	0	15,300,000	88.95 %	1,900,000
052.0C Fasilitas Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	34,800,000	0	30,400,000	0	30,400,000	87.36 %	4,400,000
052.0D Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	100.00	0
BL.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	15,880,000	0	15,880,000	0	15,880,000	100.00	0
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	15,880,000	0	15,880,000	0	15,880,000	100.00	0
BAA.001 Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15,880,000	0	15,880,000	0	15,880,000	100.00	0
051 Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi	15,880,000	0	15,880,000	0	15,880,000	100.00	0
051.0A Layanan Pascarehabilitasi	15,880,000	0	15,880,000	0	15,880,000	100.00	0
BL.3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	217,645,000	0	211,995,000	5,100,000	217,095,000	99.75 %	550,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	217,645,000	0	211,995,000	5,100,000	217,095,000	99.75 %	550,000
QDB.001 Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	217,645,000	0	211,995,000	5,100,000	217,095,000	99.75 %	550,000
051 Pembinaan teknis	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
051.0A Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
052 Pemetaan kelompok sasaran	46,010,000	0	46,010,000	0	46,010,000	100.00	0
052.0A Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000	100.00	0
052.0B Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	26,570,000	0	26,570,000	0	26,570,000	100.00	0
053 Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	166,135,000	0	165,585,000	0	165,585,000	99.67 %	550,000
053.0A Bimbingan Teknis Pengigiat P4GN	85,380,000	0	85,380,000	0	85,380,000	100.00	0
053.0C Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine	41,475,000	0	41,475,000	0	41,475,000	100.00	0
053.0D Asistensi kota tanggap ancaman narkoba	550,000	0	0	0	0	0.00 %	550,000
053.0E Workshop Tematik P4GN	19,640,000	0	19,640,000	0	19,640,000	100.00	0
053.0F Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Narkoba pda Sektor Kelembagaan	19,090,000	0	19,090,000	0	19,090,000	100.00	0
054 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	5,100,000	0	0	5,100,000	5,100,000	100.00	0
054.0A Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
054.0B Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
054.0C Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	100.00	0
BL.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	88,650,000	0	86,750,000	1,900,000	88,650,000	100.00	0
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	88,650,000	0	86,750,000	1,900,000	88,650,000	100.00	0
BAA.002 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	88,650,000	0	86,750,000	1,900,000	88,650,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)	88,650,000	0	86,750,000	1,900,000	88,650,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	88,650,000	0	86,750,000	1,900,000	88,650,000	100.00	0
BL.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000	100.00	0
ADG Standarisasi Profesi dan SDM	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000	100.00	0
ADG.001 Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
ADG.001 Pelatihan	13,210,000	0			13,210,000	100.00	0
051 Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	12,910,000	0	12,910,000	0	12,910,000	100.00	0
051.0A Bimbingan Teknis Petugas IBM	12,910,000	0	12,910,000	0	12,910,000	100.00	0
052 Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
052.0A Monitoring Rencana Aksi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
BL.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	204,670,000	0	184,396,758	20,259,242	204,656,000	99.99 %	14,000
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	134,820,000	0	115,146,758	19,659,242	134,806,000	99.99 %	14,000
BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	100,020,000	0	98,920,758	1,099,242	100,020,000	100.00	0
051 Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	27,670,000	0	26,570,758	1,099,242	27,670,000	100.00	0
051.0A Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	27,670,000	0	26,570,758	1,099,242	27,670,000	100.00	0
052 Layanan Rawat Jalan	72,350,000	0	72,350,000	0	72,350,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	72,350,000	0	72,350,000	0	72,350,000	100.00	0
BAA.004 Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	34,800,000	0	16,226,000	18,560,000	34,786,000	99.96 %	14,000
051 Layanan SKHPN	34,800,000	0	16,226,000	18,560,000	34,786,000	99.96 %	14,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	34,800,000	0	16,226,000	18,560,000	34,786,000	99.96 %	14,000
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	8,950,000	0	8,350,000	600,000	8,950,000	100.00	0
BDB.001 Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	8,950,000	0	8,350,000	600,000	8,950,000	100.00	0
052 Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
052.0A Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
053 Koordinasi kelembagaan	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000	100.00	0
053.0A Rapat Koordinasi Tingkat Kota	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000	100.00	0
055 Monitoring fasilitas rehabilitasi	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0
055.0A Monitoring dan Evaluasi	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	60,900,000	0	60,900,000	0	60,900,000	100.00	0
QDB.001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	60,900,000	0	60,900,000	0	60,900,000	100.00	0
051 Pembentukan IBM	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pembentukan dan Operasional Unit IBM	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0
052 Asistensi dan Supervisi IBM	16,895,000	0	16,895,000	0	16,895,000	100.00	0
052.0A Asistensi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
052.0B Evaluasi Unit IBM	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052.0C Bimbingan Teknis Petugas IBM	12,395,000	0	12,395,000	0	12,395,000	100.00	0
053 Operasional IBM	25,095,000	0	25,095,000	0	25,095,000	100.00	0
053.0A Operasional Unit IBM	25,095,000	0	25,095,000	0	25,095,000	100.00	0
054 Layanan IBM	15,460,000	0	15,460,000	0	15,460,000	100.00	0
054.0A Penerimaan Awal	375,000	0	375,000	0	375,000	100.00	0
054.0B Layanan Wajib	9,370,000	0	9,370,000	0	9,370,000	100.00	0
054.0C Layanan Pilihan	5,715,000	0	5,715,000	0	5,715,000	100.00	0
BL.5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
BCA.002 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
051 Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
051.0A Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	21,540,000	0	21,540,000	0	21,540,000	100.00	0
051.0B Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	28,460,000	0	28,460,000	0	28,460,000	100.00	0
BL.5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	70,000,000	0	69,700,000	0	69,700,000	99.57 %	300,000
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	70,000,000	0	69,700,000	0	69,700,000	99.57 %	300,000
QDC.001 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	70,000,000	0	69,700,000	0	69,700,000	99.57 %	300,000
051 Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	70,000,000	0	69,700,000	0	69,700,000	99.57 %	300,000
051.0A Dialog Interaktif Remaja	39,895,000	0	39,895,000	0	39,895,000	100.00	0
051.0B Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/Pagelaran Seni	30,105,000	0	29,805,000	0	29,805,000	99.00 %	300,000
WA Program Dukungan Manajemen	1,448,755,000	0	1,267,253,926	171,793,336	1,439,047,262	99.33 %	9,707,738
WA.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	97,430,000	0	78,540,000	14,076,000	92,616,000	95.06 %	4,814,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90,230,000	0	72,780,000	14,076,000	86,856,000	96.26 %	3,374,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	90,230,000	0	72,780,000	14,076,000	86,856,000	96.26 %	3,374,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90,230,000	0	72,780,000	14,076,000	86,856,000	96.26 %	3,374,000
002.0A Administrasi Kegiatan	74,040,000	0	61,180,000	12,236,000	73,416,000	99.16 %	624,000
002.0B Penyampaian SPM Ke KPPN	3,710,000	0	2,400,000	0	2,400,000	64.69 %	1,310,000
002.0C Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA	12,480,000	0	9,200,000	1,840,000	11,040,000	88.46 %	1,440,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,200,000	0	5,760,000	0	5,760,000	80.00 %	1,440,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7,200,000	0	5,760,000	0	5,760,000	80.00 %	1,440,000
056 Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal	7,200,000	0	5,760,000	0	5,760,000	80.00 %	1,440,000
056.0A Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	100.00	0
056.0B Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	100.00	0
056.0C Penyusunan Laporan PNBPN Semester II T.A. 2022	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
056.0D Penyusunan Laporan PNBPN Semester I T.A. 2023	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	100.00	0
WA.3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
054 Pengembangan Pegawai	16,390,000	0	16,390,000	0	16,390,000	100.00	0
054.0A Peningkatan Kapasitas Pegawai	16,390,000	0	16,390,000	0	16,390,000	100.00	0
060 Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000	100.00	0
060.0A Pembinaan Jasmani Pegawai BNN	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
060.0B Pelayanan Kesehatan Pegawai	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	100.00	0
WA.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	13,920,000	0	2,280,000	11,640,000	13,920,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,920,000	0	2,280,000	11,640,000	13,920,000	100.00	0
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,620,000	0	2,280,000	2,340,000	4,620,000	100.00	0
063 Perencanaan Kinerja Unit Vertikal	1,200,000	0	300,000	900,000	1,200,000	100.00	0
063.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota	1,200,000	0	300,000	900,000	1,200,000	100.00	0
064 Penganggaran Unit Vertikal	3,420,000	0	1,980,000	1,440,000	3,420,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 6 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
064.0A	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran	2,820,000	0	1,380,000	1,440,000	2,820,000	100.00	0
064.0B	Koordinasi Penyelarasan Anggaran	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9,300,000	0	0	9,300,000	9,300,000	100.00	0
062	Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal	9,300,000	0	0	9,300,000	9,300,000	100.00	0
062.0A	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran	1,962,000	0	0	1,962,000	1,962,000	100.00	0
062.0B	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah	7,338,000	0	0	7,338,000	7,338,000	100.00	0
WA.3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1,297,405,000	0	1,147,033,926	145,477,336	1,292,511,262	99.62 %	4,893,738
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,209,405,000	0	1,059,033,926	145,477,336	1,204,511,262	99.60 %	4,893,738
EBA.956	Layanan BMN	6,089,000	0	900,000	5,189,000	6,089,000	100.00	0
055	Pengelolaan BMN Unit Vertikal	6,089,000	0	900,000	5,189,000	6,089,000	100.00	0
055.0A	Penghapusan BMN	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
055.0B	Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN	5,189,000	0	0	5,189,000	5,189,000	100.00	0
EBA.962	Layanan Umum	70,782,000	0	57,522,641	13,152,000	70,674,641	99.85 %	107,359
054	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal	70,782,000	0	57,522,641	13,152,000	70,674,641	99.85 %	107,359
054.0A	Rapat Kejra Teknis	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
054.0B	Koordinasi Kelembagaan	58,282,000	0	45,022,641	13,152,000	58,174,641	99.82 %	107,359
054.0C	Rapat Koordinasi Kelembagaan	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
054.0D	Pelatihan Menembak	9,050,000	0	9,050,000	0	9,050,000	100.00	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	1,132,534,000	0	1,000,611,285	127,136,336	1,127,747,621	99.58 %	4,786,379
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,132,534,000	0	1,000,611,285	127,136,336	1,127,747,621	99.58 %	4,786,379
002.0A	Pemeliharaan Gedung Dan Penataan Ruang Kantor	138,189,000	0	138,189,000	0	138,189,000	100.00	0
002.0B	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	28,250,000	0	27,615,000	635,000	28,250,000	100.00	0
002.0C	Perawatan Kendaraan Dinas	92,658,000	0	86,455,600	4,994,000	91,449,600	98.70 %	1,208,400
002.0D	Langganan Daya dan Jasa Lainnya	107,820,000	0	95,101,685	9,740,336	104,842,021	97.24 %	2,977,979
002.0E	Tenaga Kerja Kontrak	662,400,000	0	561,600,000	100,800,000	662,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419258 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0F Keperluan Sehari - hari Perkantoran	97,385,000	0	88,650,000	8,735,000	97,385,000	100.00	0
002.0G Honor Pengolah BMN	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
002.0H Rekonsiliasi Lapor BMN ke KPKNL	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
002.0I Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,632,000	0	0	1,632,000	1,632,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	38,850,000	0	38,850,000	0	38,850,000	100.00	0
052.0A Pengadaan Alat Olah Data dan Komunikasi	38,850,000	0	38,850,000	0	38,850,000	100.00	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	46,150,000	0	46,150,000	0	46,150,000	100.00	0
053.0A Peralatan Perkantoran	46,150,000	0	46,150,000	0	46,150,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
051 Pengelolaan Arsip	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
051.0A Pengelolaan Arsip	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
WA.3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20,000,000	0	19,400,000	600,000	20,000,000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,000,000	0	19,400,000	600,000	20,000,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20,000,000	0	19,400,000	600,000	20,000,000	100.00	0
054 Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN	20,000,000	0	19,400,000	600,000	20,000,000	100.00	0
054.0A Press Release	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	100.00	0
054.0B Kegiatan Kehumasan	3,600,000	0	3,300,000	300,000	3,600,000	100.00	0
054.0D Penyelenggaraan Pameran	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	100.00	0
054.0E Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	8,520,000	0	8,520,000	0	8,520,000	100.00	0
054.0F Peliputan Giat Kehumasan di Dalam Kota	3,850,000	0	3,550,000	300,000	3,850,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir